

343.04
DAC
E CI

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARI
SULAWESI TENGGARA



Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S - 2

Magister Kenotariatan

Zainuddin Dachlan
B4B 000 215

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

DESEMBER

2002

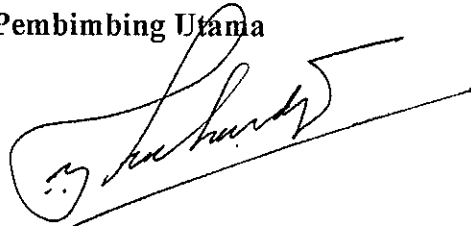
TESIS
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT
DIKANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARI
SULAWESI TENGGARA

Disusun Oleh :
Zainuddin Dachlan
B4B 000 215

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 30 Desember 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

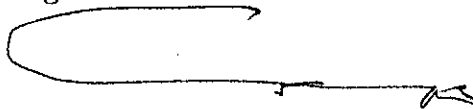
Pembimbing Utama



Noor Rahardjo, SH, MHum.

Pembimbing Kedua

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof, IGN. Sugangga, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2002

Zainuddin Dachlan

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis sungguh merasakan berkat, rachmat dan taufiknya dalam penyelesaian tugas akhir dalam pembuatan Tesis dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARI SULAWESI TENGGARA, yang diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh ujian akhir Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan selesai jika tidak mendapat bantuan dari beberapa pihak baik bantuan yang bersifat materil maupun moril, sehingga penulisan Tesis ini berjalan lancar, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menempuh studi di Universitas Diponegoro.
2. Bapak. Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan serta kedisiplinan dan kejujuran ilmiah yang selalu dicontohkan.
3. Bapak Noor Rahardjo, SH, MHum, yang ditengah kesibukannya yang luar biasa berkenan memberikan pencerahan, bimbingan, arahan, dan dorongan serta

tauladan melalui diskusi-diskusi kritis sejak dari perkuliahan sampai pada proses bimbingan tesis, sungguh banyak yang Bapak berikan baik sesuatu untuk bekal mengembangkan ilmu pengetahuan maupun bagaimana hidup ini lebih bermakna. Terima kasih dan rasa hormat penulis kepada Bapak.

4. Para guru besar dan Bapak, ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
5. Bapak Drs. H Andi Kaharuddin, mantan KADIPENDA Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan dan dorongan untuk mengikuti kuliah S-2 di Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Drs. H. Yusuf Ponea, Msi Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan bantuan financial dan dorongan untuk tetap mengikuti pendidikan S-2 di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Drs. Tridjojo Dwiwantoro, MM Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kendari yang telah banyak memberi bantuan dan kesempatan untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan materi isi tesis dimaksud.
8. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Umum yang telah memberikan bantuan informasi sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
9. Segenap pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun penyelesaian tesis ini.

10. Ayahanda (Alm) dan Ibunda Rabaya yang telah mendidik, mengasuh dan mendoakan penulis.
11. Istri tercinta dan anak-anak, dengan ketulusan serta kesabaran membimbing penulis, penuh pengertian, berkurangi waktu dan kasih sayang, serta senantiasa memberikan semangat, dorongan dan doa, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Semoga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama studi Hukum Kenotariatan.

Semarang, Desember 2002

Penulis

Zainuddin Dachlan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK/INTISARI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Formulasi Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
2.1 Pengertian Pajak	17
2.2 Efektifitas Hukum	25
2.2.1 Faktor Hukum	27
2.2.2 Faktor Penegak Hukum	31
2.2.3 Faktor Sarana/ Fasilitas	34
2.2.4 Faktor Masyarakat	35
2.2.5 Bekerjanya Hukum	36
2.2.6 Jenis-Jenis Sistem Pemungutan	39
2.2.7 Pemungutan Pajak berdasarkan sistem self assessment	40
 BAB.III METODE / CARA PENELITIAN	 47
3.1 Metode Pendekatan	47
3.2 Spesifikasi Penelitian	49
3.3 Populasi dan Sampel	49
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	50
3.5 Metode Penyajian Data	50
3.6 Metode Analisa Data	51
3.7 Lokasi Penelitian	52
3.8 Sistematika Penulisan	53
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment	55
4.1.1.1. Wajib Pajak	55

4.1.1.2. Wajib Pajak Dalam Negeri	56
4.1.1.3. Wajib Pajak Luar Negeri	57
4.1.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT)	60
4.1.1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	98
4.1.1.6. Kewenangan Aparatur Perpajakan	115
4.1.2. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak	119
4.1.3 Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum	128
4.1.3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Serta Pengajuan keberatan dan banding	128
4.1.3.2. Proses Penegakan Hukum Perpajakan	132
4.1.3.3. Pelanggaran Ketentuan Pidana Perpajakan dan Penyidikan	137
4.1.3.4. Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi	139
4.1.3.5. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	145
4.2 Pembahasan	148
4.2.1 Efektifitas Sistem Self Assessment.....	148
4.2.2 Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak	150
4.2.3 Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum	157
4.2.3.1 Ditinjau Dari Segi Penerapannya	157
4.2.3.2 Ditinjau Dari Segi Hukumnya	158
4.2.3.3 Ditinjau Dari Proses Penyelesaian Sengketa Pengajuan Keberatan Dan Banding	159
4.2.3.4 Ditinjau dari Proses Penegakan Hukum	161
4.2.3.5 Ditinjau Dari proses Pelanggaran Ketentuan Pidana, penyidikannya	163
4.2.3.6 Ditinjau Dari Proses Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi	166
4.2.3.7 Ditinjau Dari Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	168
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	171
5.1 Kesimpulan	171
5.2 Saran	173
RINGKASAN	175
DAFTAR PUSTAKA	178

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Tahun 1996 Sampai Dengan Tahun 2001	121
2. Prosentase Pencapaian Realisasi Penerimaan, di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wilayah XV Sulselra	126
3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Dari Tahun 1996 Sampai Dengan Tahun 2001	126
4. Perkembangan pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2001.....	127
5. Perundangan – perundangan Yang Mengatur Sistem Perpajakan Sebagai Landasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak	128
6. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Denda Atau Kurungan	143
7. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Sanksi Administrasi	145

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Model Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat	37

ABSTRAKSI

Kebijaksanaan pelaksanaan pemungutan Pajak Negara dengan menggunakan Sistem *Self Assessment* yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, telah dirubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan dirubah lagi terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dimaksudkan dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pelaksanaannya adalah sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak mengimplementasikan sistem *Self Assessment* kepada Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan, maka perlu dilakukan suatu penelitian, dan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Kendari dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal serta dengan penelitian Kwalitatif dan pembahasannya menggunakan teknik induktif dengan model interaktif.

Dari penelitian ini ditemukan pertama, kebijaksanaan pelaksanaan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak adalah dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak serta menurunkan jumlah surat tagihan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak dari tahun ke tahun dan dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment* sangat ditentukan oleh Wajib Pajak, karena Wajib Pajaklah yang aktif dalam menghitung, memperhitungkan jumlah pajak terhutang dalam satu tahun pajak, dan membayarnya serta melaporkannya kepada aparat perpajakan. Kedua, efektivitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* dapat dilihat dari hasil produk hukumnya yakni dari empat hasil produk undang-undang perpajakan yang lama menjadi satu undang-undang baru yang filosofinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil kualitas dari pelaksanaan sistem *Self Assessment* dapat diukur dari keberhasilan menghasilkan :

- a. Adanya peningkatan penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun.
- b. Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun.
- c. Adanya penurunan jumlah Wajib Pajak yang diberikan surat tagihan pajak (STP) dari tahun ke tahun.

Sedangkan hasil kualitas dari pelaksanaan penegakan hukum juga tersaji dalam undang-undang nomor 6 Tahun 1983, yang diubah dengan Undang Undang No. 9 tahun 1994. Dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan adanya :

- a. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi perpajakan dengan pengenaan denda, bunga dan kenaikan. Dan hal-hal yang dilanggar tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut diatas.
- b. Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak telah tersedia Lembaga yang mengakomodasi, misal terjadi sengketa pajak maka lembaga yang disediakan adalah keberatan dan banding juga diatur dalam undang-undang tersebut diatas sedang sengketa pajak dapat diajukan ke badan penyelesaian sengketa pajak UU No. 17 tahun 1997.

ABSTRACT

The policy of national tax collecting implementation using self assessment system regulated in Law no. 6 year of 1983 has been changed into law no. 9 year of 1994, and then finally changed into Law no.16 year of 2000 concerning general stipulations and taxation custom and manners. And it is aimed in the framework of intensification of tax income and exstensification of tax obligator quantity from year to year.

The success of the law implementation is extremely determined by how the tax collectors carries out self assessment system to tax obligator. To reach this purpose, it is necessary to carry out a research- at the tax service agency in Kendari - in which uses socio- legal approach and qualitative research. The discussion of research uses inductive technique with interactive model.

From this research is found that first, the policy of self assessment system implementation in tax collecting is intended to increase tax revenue and the quantity of tax obligator and to decrease the quantity of tax claim letter given to tax obligator from year to year. Then in the implementation of self assessment system is extremely determined by tax obligator since he who actively counts and covers the total of owed- tax in one year of tax and furthermore he pays and reports to taxation agency. Second, the effectiveness of self assessment system implementation can be seen from the results of law product that are from former four tax law products become one law products which its philosophy based on Pancasila and UUD 1945.

The quality result of the implementation of self assessment system can be measured from the success which result :

- a. The existence of increase of national tax from year to year.
- b. The existence of increase of tax obligator from year to year.
- c. The existence of decrease of the quantity of tax obligator which receives tax claim letter (STP) from year to year.

Whereas the product quality from the implementation of law enforcement is also presented in the law no.6 year of 1983 which changed into the Law no. 9 year of 1994, and finally it is changed into the Law no. 16 year of 2000 concerning general stipulation and custom and manner of taxation by the existence of:

- a. Administration sanction on taxation administration offense in the form of fine imposition, interest and increase and matters violated as well as included in law articles above
- b. Tax collecting using warrant as well as regulated in the law no. 19/ 2000 concerning tax collecting using warrant.

Furthermore, law protection given to tax obligator has provided a committee which is going to accommodate, for example when there is a tax dispute, the committee existed will has objection and then appeal to a higher court level as well as regulated in the law mentioned above, while tax dispute can be submitted to the tax dispute settling committee (The Law no,17 year of 1997).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap masyarakat yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikenakan kewajiban pajak sebagai imbalan atas kenikmatan yang diperolehnya. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, maka perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Sejak mashab Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas Malthus pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu negara.

Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan.

Pajak adalah pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung. Oleh karena tidak ada

kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut.¹

1. Asas legal mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan-peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam undang-undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.
2. Asas kepastian hukum artinya bahwa ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai suatu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan dapat menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, pendefinisian, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku.

¹ Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional dan Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madia Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 1997, hal. 2*

3. Asas efisien dikandung maksud bahwa pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio, pajak anjing dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya.
4. Asas non distorsi, berarti bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalnya alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.
5. Asas sederhana (*simplicity*) berarti bahwa aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus, maupun oleh wajib pajak. Aturan-aturan yang kompleks disamping akan menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes*.
6. Asas adil, terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan. Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari wajib

pajak (*ability to pay*). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria kedua adalah prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

Sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Hal itu juga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu diciptakan suatu sistem pembaharuan perpajakan yang dapat menggalang kegotong royongan dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak yaitu diberlakukannya sistem *Self Assessment*.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang memuat landasan dalam pemungutan pajak sebagian besar adalah merupakan sisa warisan

pemerintah Belanda. Meskipun peraturan perundang-undangan perpajakan telah beberapa kali dilakukan perubahan untuk penyesuaian. Akan tetapi dikarenakan perbedaan falsafah dan sistem yang melatarbelakanginya, maka sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan dari perundang-undangan tersebut tidak akan dapat memenuhi fungsi dari pemungutan pajak untuk menunjang cita-cita luhur bangsa Indonesia serta Pembangunan Nasional yang saat ini sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Sistem pemungutan pajak yang lama adalah *Official Assessment* yang mana segala sesuatunya dilakukan oleh aparatur perpajakan serta kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak fiskus (pemungut pajak). Dalam sistem *Official Assessment* ini Wajib Pajak hanya berlaku pasif, yaitu menunggu penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Masyarakat dalam hal ini wajib pajak hanya menunggu pihak fiskus kapan akan memeriksa dan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan.

Keadaan seperti itu membuat masyarakat harus mempunyai waktu khusus atau luang para Wajib Pajak untuk bertatap muka dengan aparat pemungut pajak, yang lama-lama mengakibatkan masyarakat merasa enggan dan menghindar atau kurang disiplin didalam membayar pajaknya. Masyarakat juga beranggapan bahwa di dalam administrasi perpajakan terdapat birokrasi yang berbelit-belit sehingga pemungutan pajak oleh fiskus dirasakan membebani dan menambah besar pengeluaran mereka. Keengganan dan kurang disiplinnya masyarakat di

dalam membayar pajak mengakibatkan pemasukan keuangan bagi negara berkurang, terutama dalam sektor pajak.

Berkurangnya keuangan negara mengakibatkan pula terhambatnya pembangunan yang seharusnya tidak terjadi apabila masyarakat mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ciri dan corak sistem lama warisan jaman kolonial antara lain :

- a. Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan seperti tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang administrasi perpajakan;
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana mengakibatkan anggota masyarakat Wajib pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional;²

Dalam sistem, *Official Assessment* ini, aparat perpajakan juga dituntut untuk bekerja lebih keras dikarenakan pemungutan pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan, yang mana harus terjun langsung di lapangan untuk bertatap muka dengan para Wajib Pajak. Sistem *Official Assessment* ini dirasakan kurang

² Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan, *Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan*, Tahun 200, hal. 222 – 223. Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000.

efisien baik oleh aparat perpajakan maupun para Wajib Pajak. Masyarakat pembayar pajak belum mengetahui secara baik dan benar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak karena aktivitas dan kegiatan mereka telah menyita banyak waktu. Hal ini mengakibatkan pengetahuan para Wajib Pajak terhadap masalah perpajakan sangat minim bahkan banyak yang sama sekali tidak tahu. Sering terjadi pula para Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak berusaha sedapat mungkin untuk menghindar dengan berbagai cara agar supaya tidak terkena pajak. Hal-hal seperti inilah yang membuat tertundanya pembangunan dan menjadikan masalah baru bagi negara khususnya aparat perpajakan. Sehingga sektor pajak belum dapat memehuni fungsinya sebagai sarana/penopang pembangunan sebagai perwujudan dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Kini di bidang perpajakan telah dilakukan "*tax reform*" yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan Undang-undang ini sistem pemungutan pajak yang lama yaitu sisten *Official Assessment* diganti menjadi sistem *Self Assessment*. Dalam tata cara "*Self Assessment*" kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, dimana Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk :

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan / kekayaan / laba;
- b. Menghitung sendiri besarnya pajak : Pendapatan / Kekayaan yang terhutang dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Pembaharuan sistem Perpajakan Nasional atau tax reform adalah bertujuan antara lain untuk kesederhanaan, kepastian hukum. menutup peluang

penyalahgunaan wewenang, baik oleh wajib pajak maupun Aparatur pajak. Titik berat pembaharuan tersebut adalah dengan diberlakukannya sistem *self assessment* untuk memenuhi amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam reformasi perpajakan pertama ini terdapat suatu perubahan sistem yang sangat mendasar yaitu dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak tidak hanya menjadi objek tetapi justru menjadi subjek yang harus aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak dalam sistem perpajakan nasional.³ Dan juga agar supaya masyarakat jangan mempunyai perasaan bahwa pajak itu bukan kewajiban yang dapat dipaksakan, melainkan juga hak untuk ikut serta dalam memelihara dan melanjutkan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah membutuhkan banyak pengorbanan.

Tata cara ini hanya dapat berhasil dengan baik, bilamana masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax Consciousness*).⁴ Dikarenakan kurang disiplinnya masyarakat dalam perpajakan maka pelaksanaan tata cara perhitungan pajak sendiri khususnya di negara kita, tidak sepenuhnya dipercayakan kepada Wajib Pajak baik perhitungan terhadap besarnya pendapatan / keuntungan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat

³ Miyasto, op cit, hal. 9

⁴ R. Santoso Brotodihardjo, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1982, cetakan ke-X, hal. 60.

yaitu dengan cara menetapkan dasar pemungutan (*tax base*) dan tarif pajak (*tax rate*), yang merupakan langkah awal menuju ke arah pelaksanaan *Self Assessment* secara murni. *Self Assessment* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka berarti *Self* yaitu sendiri dan *Assessment* yaitu taksiran / menaksir, jadi *Self Assessment* dikandung maksud bahwa setiap Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

Dalam Perpajakan dikenal ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :
 - (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - (b) wajib pajak bersifat pasif, (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, (b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, (c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.⁵

Apabila dikaitkan dalam ajaran formal (hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak) dan ajaran material (hutang pajak timbul karena undang-undang) maka ajaran formal diterapkan pada *official assessment system* dan ajaran material diterapkan pada *self assessment system*.

Dianutnya sistem pemungutan *self assessment*, mengandung konsekuensi bahwa setiap orang atau badan yang telah memenuhi *latbestand* wajib membayar pajak, dimana anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Berpijak dari hal tersebut di atas masyarakat juga menghendaki adanya "Aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih" agar dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan dengan penggunaan sistem Self Assessment ini, pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan sehingga tercipta suatu administrasi perpajakan yang lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat sebagai Wajib Pajak. Rendahnya kesadaran

⁵ Masdiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987. hal 8

warga negara untuk membayar pajak kepada negara banyak ditentukan oleh sejauhmana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa dari negara seperti : menikmati keamanan / ketertiban dan pelayanan yang memuaskan sehingga tercapainya tujuan yang hendak dicapai seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem *Self Assessment* dalam pelaksanaannya tentu mempunyai kebaikan yaitu mengenai dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai, sedang kelemahan dari sistem *Self Assessment* selama ini adalah menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan sistem tersebut.

Menurut Suharsono Hadi Kusumo, bahwa sistem *Self Assessment* sejak berlakunya belum berhasil dengan baik karena belum ada penelitian mengenai hal itu baik secara sosio-ekonomi maupun sosio-filosofi. Yang diketahui saat ini adalah berasal dari data yang diumumkan, disebutkan bahwa peranan pajak di Indonesia hanya sekitar 12 persen dari GDP dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak $\pm 1,5$ juta orang dan yang memasukkan hanya sekitar 700 ribu orang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kegagalan menjalankan *Self Assessment* antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut :⁶

1. Masih sangat banyak Wajib Pajak di Indonesia terutama dari golongan menengah dan kecil yang belum mengerti *Self Assessment* karena terbiasa menerima penetapan pajak.

⁶ Berita Pajak Nomor : 1423 / tahun XXXII / 15 Juli 2000, hal. 14.

2. Aparatur pajak tidak sepenuhnya menguasai data dan kegiatan Wajib Pajak. Sejak 1984 Bagian Dinas Luas sudah dihapus, padahal mereka melakukan pembuatan data monografi tentang keadaan Wajib Pajak setiap tahun.
3. Masuknya data mengenai Wajib Pajak dari pihak lain di luar administrasi pajak sangat kurang. Masalah memungut pajak dianggap urusan Dirjen Pajak sendiri.
4. Sistem komputerisasi perpajakan yang belum baik, belum bisa *on-line* untuk seluruh Indonesia, tidak ada jaminan bahwa data yang masuk itu benar dan banyak yang tidak masuk.
5. Sumber daya manusia Dirjen Pajak masih lebih suka menjalankan sistem *Official Assessment*, misalnya dalam melakukan pemeriksaan dan menetapkan pajak tidak dapat menunjukkan pasal undang-undang perpajakan apa yang telah dilanggar oleh Wajib Pajak.
6. Undang-Undang Perpajakan banyak yang diubah sehingga bertentangan dengan sistem *Self Assessment*, misalnya penghapusan Pasal 30 UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh, yang menghapuskan jaminan *Self Assessment* bagi Wajib Pajak, pemberlakuan Pasal 4 ayat (2) berupa pengenaan PPh yang bersifat final, dan UU No. 17 Tahun 1997 tentang BPSP yang tidak adil dan menimbulkan kekacauan hukum di bidang peradilan pajak.
7. Tidak ada perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, UU Perpajakan hanya mengatur kewajiban dan sanksi kepada Wajib Pajak, tidak ada sanksi bagi aparatur pajak yang salah dalam menjalankan tugas. UU Perpajakan lebih

banyak mengatur kepentingan pemerintah untuk memungut pajak sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Selanjutnya dikatakan Soejatna Soenoeboebrata, bahwa setelah 17 tahun diterapkannya asas *Self Assessment* pelaksanaannya tidak dapat berjalan mulus, hal ini adanya 2 (dua) hal yang menyebabkannya yaitu :

1. Budaya kerja yang tidak mampu diubah

Berdasarkan kebiasaan di dalam asas *Official Assessment* dimana pejabat pajak menetapkan besarnya pajak maka dalam mengetrapkan asas *Self Assessment* pun mereka cenderung bersikap sama yaitu tidak mempercayai perhitungan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan tidak adanya perubahan pola kerja dari sebelum dan sesudah diterapkannya asas *Self Assessment*.

2. Perkembangan profesionalisme pejabat pajak yang cenderung berjalan di tempat.

Hal ini dilihat dari perkembangan keahlian yang ada tidak dapat mengimbangi perkembangan yang dihadapi, ini dilihat dari tenaga-tenaga Dirjen Pajak, dalam melihat prakteknya di dalam menghadapi masalah-masalah lapangan pemecahan yang dipakai kembali kepada cara-cara tradisional.⁷

Melihat dari permasalahan-permasalahan pelaksanaan sistem *Self Assessment* sejak diberlakukannya sampai dengan sekarang, maka dapat ditarik kesimpulan

⁷ Berita Pajak Nomor 1417 / Tahun XXXII / 15 April 2002.

bahwa pelaksanaan sistem *Self Assessment* belum berlaku efektif, sebagaimana yang diharapkan dalam peraturan perpajakan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak maka dapat dilihat dari adanya :

1. Peningkatan jumlah penerimaan dibanding sebelumnya
2. Peningkatan jumlah wajib pajak
3. Berkurangnya jumlah surat tagihan pajak

Kaitan dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak di Kendari Sulawesi Tenggara tentu juga tidak akan terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dalam penerapan sistem *Self Assessment* apakah juga dijumpai di kantor pelayanan pajak Kendari Sulawesi Tenggara apalagi Kendari Sulawesi Tenggara jika dilihat dari kondisi masyarakat Wajib Pajaknya terdiri dari masyarakat yang :

1. Tingkat pendidikan khusus dibidang perpajakan masih sangat kurang atau sangat terbatas, sehingga dalam menerapkan sistem *Self Assessment* dalam perhitungan pajak para Wajib Pajak akan menemui kesulitan.
2. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (agraris) yaitu sebanyak 54,77 %, sedangkan diluar pertanian baru mencapai 45,23% (sesuai data yang ada)
3. Sangat religius, yaitu masyarakat / Wajib pajak yang sangat taat terhadap perintah agamanya.

Dari latar belakang tersebut diatas dan melihat dari adanya ketiga karakter masyarakat Wajib pajak, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut diatas, khususnya tentang “Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara”.

1.2. Formulasi Masalah

Pembahasan masalah dalam tesis ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara” dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem *Self Assessment* di kantor pelayanan pajak Kendari Sulawesi Tenggara ?
2. Apakah pelaksanaan sistem *Self Assessment* dapat berlaku efektif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Self Assessment* dalam pemungutan pajak
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pajak. Di samping itu diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya kajian-kajian tentang penerapan hukum sebagai *Public Policy* (Kebijaksanaan Negara).
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai Fiscus dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan pada masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Sampai saat ini tidak ada batasan pengertian pajak yang sifatnya universal. Dari sudut pandang yang berbeda, masing – masing sarjana yang melakukan pengkajian pajak memberikan batasan pengertian sendiri – sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang dapat digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.⁸

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta / individu ke sektor masyarakat/ pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dapat mengurangi pendapatan seseorang dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu dan

⁸ Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Ereso Bandung, 1987 hal 12.

pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar pada ekonomi individu, sehingga pajak dapat merubah pola konsumsi dan pola hidup individu. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem. Pengangguran, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Pemungutan pajak ada di tangan pemerintah, dan pembuatan peraturan dipersipkan oleh Pemerintah dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Dalam menyusun peraturan pajak, pemerintah dapat memasukkan politik yang dikehendaknya. Jadi dalam pembuatan dan pelaksanaan Undang- Undang pajak, pemerintah akan menggunakan kebijaksanaanya dan menggunakan pajak – pajak tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan tujuan Pemerintah tertuang dalam GBHN yang mendukung politik pemerintahannya (*fiscal policy*).

Batasan pengertian pajak yang menitik beratkan pendekatan dari segi hukum ini mempunyai konsekuensi bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945 memberikan pengaturan : “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Namun mempunyai dasar filosofis yang lebih jauh, yaitu sebagai dasar legitimasi peralihan kebijakan dari sektor privat kepemikiran yang demikian ini sebenarnya telah diterima secara universal, dalam arti tidak hanya berlaku di Indonesia saja,

tetapi misalnya di Amerika Serikat dengan falsafah yang bunyinya : *"Taxation Without Representation is Robbery"*. Di Inggris dikenal dengan falsafah : *"No Taxation Without Representation"*.

Pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, maka politik hukum akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapai. Politik hukum perpajakan yang implementasinya tertuang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas, misalnya pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi dan untuk tabungan, pilihan untuk menabung, penyediaan tenaga kerja dan lain-lain.⁹

Mengingat luasnya dampak perpajakan, maka pembebanan pajak harus mencerminkan keadilan. Prinsip pembebanan pajak harus adil sebenarnya telah diterima secara universal. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana ukuran keadilan itu. Pembebanan pajak secara adil sebenarnya dapat dilihat dari dua hal, yaitu keadilan dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak dan keadilan dilihat dari alokasi beban pajak mensyaratkan agar beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak melebihi kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*).

Teori yang melakukan pengkajian terhadap pembebanan terhadap individu adalah teori kewajiban pajak Mutlak dari Otto Von Gierke, yang

⁹ Guritno Mangunsubroto, *Ekonomi Publik Edisi 3*, BPFE, Yogyakarta, 1973, hal 264

mengatakan bahwa negara ini merupakan satu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga maka individu tidak dapat hidup. Lembaga tersebut karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup negara dan sebagainya. Lembaga selaku organ, mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, antara lain pajak tidak dapat ditawar lagi. Berdasarkan pemikiran demikian maka pemungutan pajak walaupun membebani individu, dapat dibenarkan.¹⁰

Fiscus diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya, maksudnya adalah :

- (a) Untuk melindungi kepentingan wajib pajak karena ia telah membuka / memperlihatkan buku-bukunya dan juga catatan-catatan lainnya kepada fiscus. Jadi kepercayaan yang telah dicurahkan kepada fiscus itu, tidak boleh dikhianati, tidak boleh disalahgunakan oleh fiscus dengan cara, misalnya meneruskan/ memberitahukan kepada pihak lain, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak.
- (b) Fiscus dapat menolak setiap permintaan dari pihak manapun, swasta maupun instansi-instansi pemerintah negara kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan guna kepentingan peradilan.

¹⁰ Soemitro Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco Bandung, 1986, hal 31

- (c) Dalam membuat Undang-undang si pembuat harus sudah memperhatikan segala sesuatu yang berpokok pangkal kepada keadilan, walaupun demikian ada kalanya terdapat sesuatu hal yang belum terpikirkan olehnya pada waktu membuat undang-undang tersebut sehingga berakibat kurang adil dalam pelaksanaan undang-undang pajak.

Dalam hal pelaksanaan peraturan-peraturan pajak bertentangan ataupun akan bertentangan dengan kepentingan umum, atau menyebabkan ketidakadilan yang besar, maka keadilan dapat dikembalikan (dipulihkan) dengan adanya "Ordonansi keadilan" yang mengatur tentang kekuasaan Presiden untuk mengembalikan atau membebaskan pajak, peraturan ini termuat dalam *Staatblad* 1929 Nomor 187 yang diubah dalam *Staadblad* 1940 nomor 226. Hanya perlu dicatat bahwa prosedurnya sangat berbelit-belit.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah bergeser dari sistem kontinental (*Continental system*) kepada sistem Anglo-Saxon (*Anglo Saxons System*). Sistem pemungutan pajak yang berorientasi pada sistem kontinental dibedakan dalam 3 (tiga) jenis stelsel atau sistem yaitu :

- a. Stelsel Fiksi, yaitu cara pemungutan pajak dengan menggunakan suatu anggapan bahwa jumlah pajak yang dipungut berdasarkan obyek pajak yang diperoleh pada awal tahun pajak dengan demikian pajak dibayar di muka (*Voorheffing*). Dalam satu tahun pajak dianggap sama dengan 12 kali penghasilan dalam satu bulan dan anggapan penghasilan dapat berdasarkan penghasilan pada tahun yang lalu, sistem ini kurang mendapat dukungan

- dasar hukum yang sebenarnya, karena dengan menggunakan anggapan penghasilan tahun yang lalu, maka pada tahun yang berjalan belum mendapat kepastian bahwa penghasilan akan sama, karena kemungkinannya akan lebih besar atau lebih kecil.
- b. Stelsel Riil (nyata), yaitu sistem pemungutan pajak berdasarkan penghasilan yang diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini pajak dipungut dibelakang (*Naheffing*). Kebaikannya yaitu pajak dipungut sesuai obyek pajak yang sebenarnya, sehingga tidak merugikan wajib pajak. Sedangkan kelemahannya yaitu pemerintah baru dapat menerima pembayaran sesudah tahun pajak berakhir, dengan demikian dapat merugikan anggaran penerimaan negara.
- c. Stelsel Campuran, yaitu sistem pemungutan pajak yang pertama menggunakan sistem Stelsel Fiksi untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Sementara, kemudian pada akhir tahun ditetapkan Surat Keputusan Definitif menurut Stelsel Riil. Sistem stelsel campuran merupakan sistem pemungutan pajak yang dapat menghindarkan kelemahan-kelemahan pada Stelsel Fiksi dan Stelsel Riil, karena :
- 1) Pada Awal tahun sudah dapat dikeluarkan surat ketetapan pajak sementara, sehingga pajak dapat dipungut dengan segera untuk mengisi kas negara.
 - 2) Pada akhir tahun dilakukan koreksi atas pajak terhutang yang sebenarnya harus dibayar.

- 3) Wajib pajak tidak akan menanggung beban pajak terlalu berat di luar beban yang sebenarnya sesuai kemampuannya.

Sistem pemungutan pajak yang berorientasi pada sistem Anglo - Saxon dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sistem *Official Assessment* atau *Administratif Assessment* yang artinya cara pemungutan pajak yang penetapan obyek pajak dan menghitung besarnya pajak terutang untuk setiap wajib pajak ditetapkan oleh aparat pajak (fiscus), dengan cara membuat Surat Ketetapan Pajak Tetap (SKPT) dalam satu tahun pajak. Menurut sistem ini wajib pajak bersifat pasif, hanya menunggu besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar berdasarkan data yang dimasukkan, kemudian diverifikasi menurut kaca mata Fiscus sebagai dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Tetap (SKPT).
- b. Sistem *With Holding*, yaitu cara pemungutan pajak yang dalam menghitung besarnya pajak terutang, memotong dan menyetorkan pajak ke Kas Negara.

Dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan sumbernya obyek pajak dan melaporkan pembayaran pajak atau hasil pemotongan itu kepada wajib pajak. Di Indonesia sistem *With Holding* diterapkan dalam cara pemungutan pajak penghasilan menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983, terutama PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 pihak badan yang berkewajiban dan diberikan wewenang untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajaknya.

- c. Sistem *Self Assessment* dapat diartikan sebagai sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri jumlah obyek pajak dan menghitung sendiri besarnya pajak terhutang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan menyetorkan sendiri pajak yang masih harus dibayar dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan data dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang diserahkan dan memberikan laporan mengenai setoran pajak yang telah dilakukannya kepada kantor pelayanan pajak setempat.

Dalam sistem *Self Assessment* ini pihak wajib pajak bersifat aktif mengatur sendiri proses pembayaran pajaknya, sedangkan pihak fiscus bersikap pasif. Pihak fiscus hanya memberikan pembinaan dan penyuluhan atau penerangan mengenai peraturan perpajakan yang harus diterapkan, melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak.

Adapun tujuan sistem *Self Assessment* menurut Slamet Munawir :

- 1) Meningkatkan kesadaran pajak (*Tax – Conciousness*) dari wajib pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Adanya hasrat dan minat yang tinggi (*tax – mindedness*) wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

- 3) Adanya kepatuhan membayar pajak (*tax – compliance/ tax obidience*) dan adanya disiplin dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya.
- 4) Adanya kejujuran wajib pajak (*honesty*), yaitu kejujuran wajib pajak dalam mengisi dan membayar angsuran pajak dan mengisi SPT tahunan sesuai keadaan.
- 5) Terhindar dari timbulnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak yang terhutang (*tax dodger*).

2.2. EFEKTIFITAS HUKUM

Guna pembahasan pelaksanaan sistem Self Assessment perlu diketahui kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Kebijakan akan dilihat dari arah kebijakan, isi kebijakan tersebut, pelaksana kebijakan, penerima kebijakan dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, yang hal ini dapat terangkum dalam pembahasan efektifitas peraturan/ kebijakan tersebut.

Berbicara tentang efektifitas hukum perundang-undangan tidaklah dapat lepas dari masalah pelaksanaan dalam penegakan hukum/perundang-undangan itu sendiri. Karena masalah efektifitas adalah berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaannya.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 216.

Menganai masalah pelaksanaan hukum adalah masalah bagaimana hukum ditegakkan atau disebut penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Bahwa hukum dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila P. Scholten mengatakan bahwa “manakala hukum tidak pernah dilaksanakan, maka tidak lagi disebut sebagai hukum” hukum terutama dapat dilihat dalam bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah / peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan jelas tidak dapat melakukan semuanya itu. Dengan demikian menjadi relevan untuk dibicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :¹³

1. Faktor Kaidah Hukum / peraturan itu sendiri ;
2. Faktor petugas/penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hal 69.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan essensi dari penegakan hukum serta merupakan juga tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁴

2.2.1. Faktor Hukum

Dalam tulisan ini yang diuraikan hanya dibatasi pada pengertian hukum pada undang-undang dalam arti materiil saja, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat menjadi telaah yang mendalam mengenai faktor hukum yaitu kaidah hukum atau peraturan, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis ?
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya :
 - a. Apakah secara hierarkhis tak ada pertentangan ?
 - b. Apakah secara horisontal tidak ada pertentangan ?
3. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup ?

¹⁴ Soerjono Soekanto, op cit, hal.9.

¹⁵ Soeryono Soekanto, op.cit, hal 14.

4. Apakah penerbitan peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis ?

Bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misal badan legislatif pembuat peraturan telah membuat peraturan yang dirasa sulit untuk dilaksanakan, maka sejak saat itu sebenarnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan hukum dalam penerapannya.

Hal tersebut diatas dapat terjadi bila peraturan memerintahkan sesuatu yang harus dilaksanakan namun tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mencukupi, atau bila suatu peraturan dilaksanakan namun peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip/ kaidah ilmu, juga dapat terjadi bila peraturan mewajibkan agar masyarakat berbuat sesuatu, namun ternyata mendapat tantangan dari rakyat. Untuk menghadapi situasi-situasi seperti tersebut, apa yang dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Dalam hal ini dapat terjadi suatu penggunaan kekuatan untuk memaksa ataupun sebaliknya dapat terjadi penegakan hukum menyerah, yang berarti mengendorkan penerapan peraturan tersebut.

Pekerjaan menciptakan atau membuat peraturan menurut *Fuller* harus memenuhi 8 syarat agar hukum dapat berfungsi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan sebaliknya sebanyak mungkin bersifat umum.

Dalam arti tidak ada golongan orang yang mempunyai keistimewaan, berdasarkan suku, agama, ras dan sebagainya. Pengecualian akan tidak sesuai dengan asas persamaan yang dijunjung tinggi oleh hukum pada saat ini.

- b. Peraturan harus diumumkan.

Agar suatu peraturan dapat memenuhi fungsi pengaturannya maka peraturan tersebut harus disebarluaskan secara umum. Bagi suatu undang-undang pengumuman itu merupakan syarat suatu undang-undang yang mengikat. Tidak suatu undang-undang yang mengikat sebelum diumumkan secara patut.

- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

Apabila peraturan hukum itu dilihat sebagai alat untuk mengemudikan tingkah laku, maka mudah dipahami bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut, dalam arti undang-undang hanya boleh berlaku untuk waktu yang akan datang.

- d. Peraturan harus jelas, jangan sampai berarti ganda.

Dalam suatu peraturan perlu dibuat penjelasan agar dapat diketahui kepastian maksud pembuat undang-undang.

- e. Peraturan tidak boleh saling bertentangan.

Pembuat undang-undang tidak boleh memerintahkan sesuatu dan pada saat yang sama melarang sesuatu untuk hal yang sama. Dalam hal ini ada suatu adagium bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang terdahulu.

- f. Peraturan tidak boleh menuntut hal yang tidak mungkin.

Bahwa seharusnya pembuat undang-undang memperhatikan kemungkinan secara manusiawi.

- g. Peraturan hukum sebaiknya mempunyai sesuatu keadaan tertentu yang tidak berubah (*zekere consistentie*).

Pembuat undang-undang seharusnya jangan terlalu sering merubah peraturan. Untuk setiap usul perubahan seharusnya dipertimbangkan adakah ketidakpastian yang dapat timbul karena perubahan itu seimbang dengan keuntungan yang diperoleh dari perubahan itu.

- h. Peraturan tidak hanya untuk para yusticiabel, tetapi berlaku juga untuk penguasa.

Penguasa harus secara tertib berpegang teguh pada peraturan, karena kepercayaan pada peraturan akan terancam apabila pembuat aturan tidak berpegang teguh pada aturan yang dibuatnya.

Bahwa delapan syarat tersebut diatas adalah merupakan syarat minimal yang seyogyanya harus diperhatikan oleh seorang pembuat undang-

undang, apabila ia ingin memberi suatu sumbangan yang bernilai suatu sistem hukum.

2.2.2. Faktor Penegak Hukum

Sebenarnya ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum, serta menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya petugas mempunyai suatu pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas. Dalam penegakan hukum mungkin petugas menemui masalah sebagai berikut :¹⁶

1. Sampai sejauhmanakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada ?
2. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan ?
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat ?

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, op cit, hal. 16.

4. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya ?

Dari keterangan diatas nyata bahwa faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Bila peraturan baik tetapi kualitas petugas tidak baik, maka terjadi masalah, demikian juga sebaliknya.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara sosiologis lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. seorang penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*Status konflik*). Sedang apabila didalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi satu kesenjangan

peranan (*role distance*). Peranan yang seharusnya dari para penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Peranan yang sebenarnya atau peranan aktual adalah perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan dilain pihak melakukan diskresi didalam keadaan tertentu. Diskresi adalah menyangkut pembuatan keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegakan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan.¹⁷

Van Dorn mengatakan bahwa dalam kedudukan sebagai pemegang fungsi dalam satu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor kepribadiannya, asal – usul sosialnya serta tingkat pendidikannya, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri. Apa yang diutarakan *Van Dorn* mengisyaratkan agar dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum dapat memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia penegak hukumnya.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op. cit, hal 10.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 26.

2.2.3. Faktor Sarana / Fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan¹⁹

Tanpa ada sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana/fasilitas, adalah soal efektivikasi dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi kalau ancaman hukuman hanya tercantum diatas kertas maka hal itu tidak ada artinya efek dari satu sanksi negatif tersebut akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Op.cit., hal. 17.

diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Dengan demikian yang penting pada sanksi negatif adalah kepastiannya bahwa sanksi tersebut akan diterapkan.²⁰

2.2.4. Faktor Masyarakat

Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia.²¹

Berbicara mengenai masyarakat, maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya kalau misalnya derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas memang berfungsi. Namun tidak sesederhana itu, untuk sekedar memberi gambaran betapa rumitnya masalah, perlu diberikan suatu contoh yang berkisar pada kepatuhan tersebut. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebabnya masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada soal lain, yaitu yang menyangkut ketidak patuhan.

Persoalannya adalah sebagai berikut :

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 90-91.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal.57.

1. Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya ?
2. Apabila peraturannya baik serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan masyarakat tidak patuh ?
3. Apabila peraturannya baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan ?²²

2.2.5. Bekerjanya Hukum

Erat kaitannya dengan upaya penegakan hukum tersebut diatas adalah mengenai faktor bekerjanya hukum.

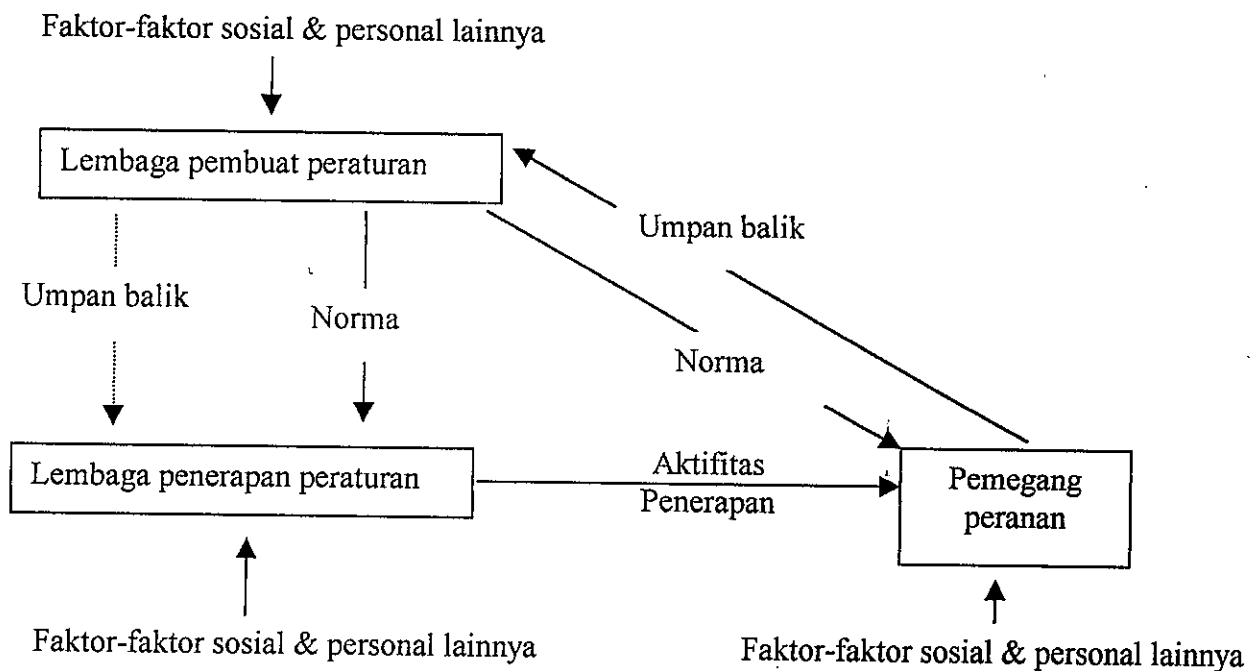
Bahwa tata hukum merupakan seperangkat norma-norma, yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma hukum itu. Dalam kehidupan masyarakat maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kita kepada penglihatan mengenai hukum

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, op.cit, hal 18.

sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka kita tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum.²³

Sosiolog *William J. Chambliss* dan *Robert B. Seidman* menyebutkan anggota masyarakat yang dikenai peraturan (*norma adressat*) sebagai pemegang peran, dimana peranannya diharapkan sesuai dengan tujuan peraturan perundangan.

Secara lebih gamblang *Chambliss* dan *Seidman* mengemukakan model bekerjanya hukum dalam masyarakat pada bagan sebagai berikut :²⁴



²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op.cit., hal.48.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op., cit hal.27.

Olehnya bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

2.2.6. Jenis – jenis Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cir-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.7. Pemungutan Pajak Berdasarkan Sistem Self Assessment Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Karakteristik dan corak sistem pemungutan pajak yang baru berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan pertama atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan undang-undang nomor 16 tahun 2000 sebagai perubahan kedua atas undang-undang no. 6 tahun 1983.

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada

anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam Perundang-undangan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat dibawahnya.

Menurut ketentuan undang-undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak berdasarkan undang-undang nomor. 6 Tahun 1983 dan undang-undang nomor. 9 tahun 1994 menganut sistem *Self Assessment*. Beberapa pasal-pasal yang dapat menunjukkan bahwa undang-undang ini menganut sistem *Self Assessment* adalah :

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 tahun 1994 yang berbunyi bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Didalam penjelasan pasal yang dimaksud dipertegas lagi bahwa semua wajib pajak berdasarkan sistem *Self Assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri tersebut

berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Ayat (2) berbunyi bahwa setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dan kepadanya diberikan pengukuhan pengusaha kena pajak

- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1994 mengatakan bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengisian Surat Pemberitahuan kedalam formulir yang disediakan harus dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam ayat (2) berbunyi bahwa wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- c. Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Jadi berdasarkan sistem Self Assessment bahwa terhadap kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri.

- d. Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa wajib pajak membayar dan menyetor pajak yang terhutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 948/KMK.04/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan

Pelaporan Pajak, mengatakan bahwa pajak penghasilan bisa dibayar sendiri oleh wajib pajak.

- e. Pasal 12 undang-undang nomor 6 tahun 1983, yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pada prinsipnya pajak terhutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat terhutangnya pajak tersebut adalah :

- 1) Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga.
- 2) Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan
Jumlah pajak terhutang yang telah dipotong, dipungut ataupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayarannya.

Berdasarkan undang-undang ini fiscus tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Atas Keseluruhan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Penerbitan sesuatu surat ketetapan

pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu yang meliputi tujuan diimplementasikannya sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh reformasi perpajakan nasional.

BAB III

METODE / CARA PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi terhadap hukum²⁵ (*Socio Legal Approaches*). Pendekatan normatif digunakan sebagai titik masuk (*akses*), sedangkan untuk kedalamannya dan perluasannya menggunakan pendekatan *Socio Legal*, karena dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian ini disamping akan dikaji secara teori (*Law In Book*), juga dikaji bagaimana yang terjadi di masyarakat (*Law in Action*).

Pendekatan *Socio Legal* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam

²⁵ Penyebutan lain sosiologis adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang satu dengan yang lain, harus sesuai dengan yang lain, harus sesuai dan saling mendukung agar kesimpulan yang tidak meragukan. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas F.H. Undip, 14-15 Mei 1999, Semarang, hal. 20.

masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.²⁶ Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dan sistem *Self Assessment*, yang bersarankan hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam implementasinya disamping perlu diteliti dari aspek-aspek hukumnya juga realitas empiriknya dalam masyarakat. Hal tersebut karena dalam perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam perundang-undangan disamping menyangkut persoalan hukum juga tingkah laku sosial.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.²⁸ diharapkan dengan metode tersebut akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*Natural Setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Artinya penelitian ini tidak hanya merekam

²⁶ Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 9.

²⁷ Yaheskel Dror, dalam Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta 1994 hal. 90-91.

²⁸ Beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1) teknik penentuan sumber data secara *Snow Hall*, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2) instrumen utama adalah manusia (peneliti/ yang divalidasi adalah data dan bukan instrumen); 3) mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan metode *verstehen*; 4) menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*. Lihat Esmi Warassih Pudjirahayu, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, dalam *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* : Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fak. Hukum Undip, Semarang, 1999, hal. 47.

hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi didalam masyarakat.²⁹

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dimana akan berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

3.3. Populasi dan Sampel

Setiap penelitian selalu berhadapan dengan masalah sampel. Populasi penelitian dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan Aparatur Perpajakan.

Dalam pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu tidak semua unsur dalam populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Yang menjadi populasi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Seluruh Wajib Pajak sejumlah 8.163 orang. Sampel dalam penelitian berjumlah 50 orang responden yang terdiri dari 40 orang responden Wajib Pajak orang pribadi dan 10 responden wajib pajak badan yang diambil secara sengaja atau Purposive Sampling (Singarimbun dan Effendi 1977) dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini relatif homogen.

²⁹ H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 175.

- b. Aparatur perpajakan yaitu Kasi PDI, Kasi TUP, Kasi PPh. OP, Kasi Badan, Kasi POT/UT, Kasi PPN/PTLL, Kasi Penagihan, Kasi PEN/KED dan Kasubag Umum sejumlah 9 orang / responden yang diambil sampel dengan sengaja atau Purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian relatif homogen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan informasi-informasi dari :

- a. Wawancara (*Interview*). Wawancara dilakukan secara terarah, tetapi bersifat terbuka yang dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan yang tercantum.
- b. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu berbagai dokumen yang didapat dari Dirjen Pajak, Kanwil Pajak, Kantor Pelayanan Pajak.

3.5. Metode Penyajian Data

Dari data yang diperoleh mencakup data yang merupakan data primer dan data sekunder yang diproses lagi secara ilmiah, sebab berapapun jumlah data dan tingkat nilai data yang terkumpul setelah diadakan penelitian maka jika tidak disusun dan diolah secara benar, data tersebut akan merupakan data yang tidak memberikan manfaat sehingga penelitian yang dilakukan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Maka dalam hal ini, data yang disajikan dalam bentuk pendapat-pendapat, keputusan serta penjelasan-penjelasan yang terurai.

3.6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis domain dan analisis taksonomis. Data yang telah dikumpulkan secara lengkap selanjutnya di analisis, agar dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Pada analisis domain ini akan menghasilkan tentang *Self Assessment* yang bersifat umum, karena analisis domain ini dilakukan pada tahap eksplorasi umum.

Hasil wawancara terhadap responden, baik terhadap Wajib Pajak maupun para fiskus dianalisis untuk menemukan suatu pemecahan permasalahan tentang pelaksanaan *Self Assessment* pada pajak secara *in concreto*, merupakan suatu usaha apakah hukumnya sudah sesuai untuk diterapkan *in concreto* pada pelaksanaan *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Kendari dengan melihat kehidupan secara kenyataan sehari-hari dalam prakteknya.

Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, data kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara secara mendalam ditelaah lebih rinci dan perhatian dipusatkan kepada masalah-masalah perpajakan dalam kaitannya dengan asas *Self Assessment* pada pajak atau ruang lingkup tentang pajak secara umum (*domain*) secara simultan, dengan memilih terlebih dahulu data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan, yang kemudian dilakukan editing data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Pada analisis ini fokus

penelitian diarahkan pada permasalahan (*domain*) tertentu yang berguna dalam mendiskripsikan fenomena perhatian (fokus) yang menjadi sasaran penelitian,

Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kelebihanannya tentang asas *Self Assessment* dalam pemungutan pajak, penelitiannya menggunakan analisis domain relatif menyeluruh, sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan. Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* tersebut.

Pada analisis Taksonomis ini dilaksanakan pada fase eksplorasi terfokus, yaitu setelah diadakan wawancara secara terfokus. Data yang dihasilkan dari wawancara terfokus, hasil studi dokumentasi, kepustakaan, serta hasil analisis domain melalui wawancara-wawancara secara umum sebelumnya dijadikan patokan untuk menelaah lebih detail dan tajam tentang pelaksanaan sistem *Self Assessment* dalam Pemunutan Pajak, hal ini sangat penting untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan asas *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Kendari.

3.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Wilayah Kota Kendari dipilih karena merupakan Ibu Kota Propinsi, dan juga merupakan kantor pelayanan pajak type A yang meliputi Kabupaten Kendari, Kota Kendari, Kabupaten Kalaka, Kabupaten Buton, Kota Bau-bau dan Muna. Sehingga terdapat banyak

Wajib Pajak dengan macam-macam karakteristik, baik dari tingkat ekonomi maupun sosial.

3.8. Sistematika Penulisan

Tesis yang hendak penulis susun hanya menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan judul Tesis ini, yaitu Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment pada Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara. Bahan-bahan dan data yang penulis peroleh, kemudian diolah dan disusun secara sederhana dan sistematis menjadi Tesis. Isi dari Tesis ini penulis bagi dalam lima bab. Pembagian bab dari Tesis ini penulis uraikan secara singkat seperti tertera di bawah ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan-landasan hukum dan pendapat para sarjana tentang pengertian pajak, efektivitas hukum, tolok ukur dari efektivitas, jenis-jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia dan pengertian *Self Assessment*.

Bab III : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian yang dipilih yaitu antara lain :

A. Metode / Cara Penelitian

- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Populasi Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Penyajian Data
- F. Metode Analisis Data

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan pembuktian serta penjelasan yang menguraikan tentang Efektivitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment Di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Saran

Dalam bab penutup pembahasan Tesis ini penulis mencoba membuat kesimpulan dari seluruh uraian yang diambil dari pembahasan tiap bab. Kemudian penulis juga memberikan sedikit saran sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait serta semua masyarakat pada umumnya.

Bab VI : RINGKASAN

Dalam bab ini akan dibuat suatu ringkasan yang merupakan rangkuman singkat yang lengkap dari keseluruhan Tesis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment*

4.1.1.1. Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut pasal 1 huruf 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 16 tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.³⁰

Wajib Pajak adalah subyek pajak yang memenuhi syarat-syarat obyektif dan juga syarat subyektif.

Subyek pajak berubah statusnya menjadi Wajib Pajak dan sebaliknya Wajib Pajak berhenti menjadi Wajib Pajak pada saat ia kehilangan sumber penghasilan secara permanen, sehingga tidak memperoleh Penghasilan Kena Pajak lagi. Juga kalau Wajib Pajak meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ia berhenti sekaligus sebagai subyek pajak maupun sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Dalam praktek, orang atau badan yang sejak awal

tahun sudah menjadi subyek pajak tetapi baru pada pertengahan tahun memperoleh penghasilan kena pajak, menjadi Wajib Pajak tidak mulai pada pertengahan tahun, melainkan dianggap sudah menjadi Wajib Pajak sejak awal tahun.

Di Indonesia Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :³⁰

4.1.1.2. Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak dalam negeri adalah subyek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat obyektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU PPh 1994. Wajib Pajak dalam negeri adalah subyek pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah ia bertempat tinggal atau berkedudukan (apabila Wajib Pajak tersebut adalah suatu badan). Dalam praktek sering terjadi orang mempunyai tempat tinggal di dua tempat dalam suatu wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berlainan. Dalam hal demikian Wajib Pajak dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat keluarganya tinggal, atau tempat ia paling banyak berada. Apabila berdasarkan fakta ini belum pula dapat dipastikan, maka

³⁰ Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung, 1990, hal. 81-82.

sudah pasti Direktur Jenderal Pajak menentukan Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berwenang untuk menentukan pajak.

Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua pendapatan yang diterioma atau diperolehnya, baik yang didapat di dalam negeri maupun yang didapat dari luar negeri.

4.1.1.3. Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri adalah subyek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah negara Indonesia (dalam hal ini Pajak Kekayaan). Berbeda dengan Wajib Pajak dalam negeri, maka Wajib Pajak luar negeri ini hanya dikenakan pajak-pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari (sumber-sumber yang ada di) wilayah negara Indonesia.

Wajib Pajak: luar negeri tidak wajib memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pendapatan, dan baginya tidak berlaku PTKP dan pula baginya susunan dan besarnya keluarga tidak mempunyai pengaruh atas besarnya jumlah pajak.

Jika orang luar negeri melakukan usaha sendiri di Indonesia melalui wakilnya, seperti seorang akuntan yang mempunyai kantor akuntan di Indonesia (milik pribadi / profesi) maka ia akan dikenakan

pajak sebagai Wajib Pajak dalam negeri, atau setidaknya-tidaknya badan usaha itu akan dikenakan pajak sebagai “Bentuk Usaha Tetap” yang juga merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Yang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah :³¹

1. Setiap badan yang menjadi subyek Pajak Penghasilan yaitu Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, BUMN, BUMD, Koperasi, Kongs, Yayasan, Lembaga/perkumpulan lain (baik yang merupakan badan hukum atau tidak) serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam bentuk perkumpulan ataupun organisasi yang lainnya seperti perkumpulan kebudayaan, perkumpulan agama, perkumpulan olah raga dan sebagainya belum tentu menjadi Wajib Pajak, hal ini tergantung dari pada terpenuhinya syarat obyektif yaitu memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Banyak pula badan yang merupakan subyek Pajak Penghasilan, tetapi tidak dan merupakan subyek Pajak Kekayaan. Karena hal tersebut juga ditentukan oleh masing-masing Undang-undang. Contoh yang lain, misalnya sebuah Yayasan, walaupun merupakan subyek Pajak Penghasilan belum tentu sebagai Wajib Pajak. Terutama Yayasan yang berpenghasilan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum tidak merupakan

³¹ H. Bohari, SH. MS. *Pengantar Hukum Pajak*, PT. RAJA GRAFINDO, Jakarta, 1993, hal. 31

obyek Pajak Penghasilan (pengecualian). Untuk kepentingan umum ini adalah :

- a. Kegiatan usaha yang bersifat sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan lain sebagainya.
 - b. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat (masyarakat pada umumnya).
 - c. Bukan usaha yang bersifat komersial (mencari keuntungan semata).
2. Setiap orang pribadi / perorangan yang mempunyai penghasilan netto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang besarnya :
- 2.1. Rp 2.880.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2.2. Rp 1.440.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - 2.3. Rp 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
 - 2.4. Rp 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga orang untuk setiap keluarga).

Bagi perseorangan atau pribadi yang hanya mempunyai satu sumber penghasilan yang semata-mata diperoleh karena hubungan pekerjaan / jabatan atau dari karyawan tersebut tidak wajib

mempunyai NPWP walaupun penghasilan yang diperolehnya sudah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4.1.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam rangka penyampaian pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak, para Wajib Pajak menggunakan apa yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³³ Surat Pemberitahuan (SPT) hanya digunakan dalam pajak-pajak langsung. Sedangkan dalam pajak tidak langsung pada umumnya tidak ada Surat Pemberitahuan yang mana sebagai dasar dalam perhitungan ataupun pengenaan pajak, Dikarenakan Wajib Pajak secara langsung menghitung sendiri dan membayar pajak tersebut. Misalkan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai dan sebagainya.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk kerja sama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak di dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Para Wajib Pajak wajib mengambil

sendiri SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kemudahan bagi Wajib Pajak mendapatkan formulir SPT, Dirjen Pajak juga menyediakan pada kantor-kantor di lingkungan Dirjen Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu dan tempat-tempat lain yang telah ditunjuk. Wajib Pajak kemudian mengisi, menghitung serta memperhitungkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*) dalam satu Masa Pajak. SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pengisian SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani sesuai dengan petunjuk dalam hal perhitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. SPT tersebut diisi dengan tidak yang sebenarnya hal ini membuat negara dirugikan dan selanjutnya dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 UU No. 16 tahun 2000. Juga terhadap keterlambatan maupun tidak menyampaikan SPT dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk SPT masa dan Rp 100.000,- untuk SPT tahunan.

Batas waktu dalam penyampaian SPT adalah :

- a. Untuk SPT Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk SPT Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperpanjang jangka waktu menyampaikan SPT Tahunan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis, disertai dengan surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia di kenal dengan 2 macam Surat Pemberitahuan :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayara pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Apabila ada Wajib Pajak tidak satu tahun penuh menjadi Wajib pajak karena ia baru saja tiba di Indonesia setelah dimulainya tahun pajak, atau ia pergi meninggalkan Indonesia atau meninggal dunia sebelum habis masa

pajak maka pajaknya akan dihitung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun dengan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun Pajak. SPT Tahunan ini berisikan data-data yang positif dari suatu tahun tertentu serta memuat jumlah yang terutang dari tahun yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan Tahunan harus dimasukkan setiap tahun dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan prosedur melaporkan perhitungan, memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan, maka sarana yang digunakan untuk prosedur tersebut yaitu para Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan beberapa hal yaitu :

1. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa ;

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan obyek pajak atau bukan obyek pajak;
- Harta dan kewajiban;
- Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Perkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluar;
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Dalam ayat (1a) disebutkan bahwa,

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam ayat (1a) tersebut diatas cukup jelas.

3. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa,

Wajib Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, Formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

4. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa,

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam penjelasannya

disebutkan bahwa, ayat ini mengatur batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya. Bagi Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

5. Dalam ayat (4) disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b untuk paling lama 6 (enam) bulan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (3) huruf b karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggoran batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perpanjangan

jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6. Dalam ayat (5) disebutkan bahwa.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak. Sebagai lampiran surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

7. Dalam ayat (5a) disebutkan bahwa,

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diterbitkan Surat Teguran.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan Surat Teguran.

8. Dalam ayat (6) disebutkan bahwa,

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan dan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib pajak orang pribadi.

Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masuk yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan tentang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

9. Dalam ayat (7) disebutkan bahwa,

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah suatu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat

Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

10. Dalam ayat (8) disebutkan bahwa, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selanjutnya pada pasal 4 Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tersebut diatas disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa, wajib Pajak Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Ayat (1) tersebut diatas cukup jelas.

2. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Ayat (2) tersebut diatas cukup jelas.

3. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa, dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

Ayat (3) tersebut diatas cukup jelas.

4. Dalam ayat (4) disebutkan bahwa, pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Ayat (4) tersebut diatas cukup jelas.

5. Dalam ayat (5) disebutkan bahwa, tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang

Bayar dan Nihil. Prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam prosedur menghitung dengan memperhitungkan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Penghasilan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang norma penghitungan penghasilan neto, menetapkan beberapa hal yaitu :

- a. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa, norma penghitungan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus.

Penggunaan norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

- a. Tidak terdapat dasar penghitungannya yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajiban.

Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

- c. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa, wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Dalam ayat (4) disebutkan bahwa, wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dalam penjelasan ayat (3) dan (4) tersebut diatas telah disebutkan dengan jelas sebagaimana yang termuat pada penjelasan ayat (2) diatas.

- e. Dalam ayat (5) disebutkan bahwa, wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :
- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan ;
 - b. Tidak tersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya dapat dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

f. Dalam ayat (6) dihapus

g. Dalam ayat (7) disebutkan bahwa, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, ditetapkan 3 (tiga) hal, yaitu, tarif pajak dan cara menghitung pajak sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10 % (sepuluh persen).
- 2) Atau ekspor barang dikenakan pajak dengan tarid 0 % (nol persen).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).

Masih dalam kaitannya dengan cara menghitung pajak di dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU no.8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, memuat beberapa ketentuan-ketentuan antara lain :

- 1) Dalam ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, nilai Ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :
 - a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan atau

- b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh :

- a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp 25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".
- b) Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp 20.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B".
- c) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan Nilai Impor Rp 15.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$.

- 2) Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. dalam penjelasannya disebutkan bahwa , Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, Pengimpor Barang Kena Pajak, Pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan juga kena pajak dari luar daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut diatas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutan dalam masa Pajak yang sama.
- 3) Dalam ayat (2a) disebutkan bahwa, dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa Pajak, maka Pajak

Masukan tetap dapat dikreditkan. dalam penjelasannya disebutkan bahwa, dalam hal Pengusahaan Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, didalam daerah Pabean atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau Impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

- 4) Dalam ayat (3) disebutkan bahwa, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas Negara menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 5) Dalam ayat (4) disebutkan bahwa, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Ayat (4) Pajak Pemasukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Contoh :

Masa Pajak Mei 2001 :

Pajak Keluaran = Rp 2.000.000,00

Pajak Masukan yang

Dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00 -/-

Pajak yang lebih dibayar = Rp 2.500.000,00

Pajak yang lebih besar tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001.

Pajak Keluaran = Rp 3.000.000,00

Pajak Masukan yang

Dapat dikreditkan = Rp2.000.000,00 -/-

Pajak yang kurang dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari

Masa Pajak Mei 2001 yang

Dikompensasikan ke bulan

Juni 2001 = Rp2.500.000,00 -/-

Pajak yang lebih dibayar Juni 2001 = Rp 1.500.000,00

- 6) Dalam ayat (5) disebutkan bahwa, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu :

- a. penyerahan terutang pajak = Rp 25.000.000,00 Pajak
Keluaran = Rp 2.500.000,00
- b. penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp 5.000.000,00
- c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =
Rp 500.000.000,00
pajak keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang Terutang Pajak =
Rp 1.500.000,00

b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN =
Rp 3.000.000,00

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
= Rp. 5.000.000,00

Menurut ketentuan ini pajak masukan yang dapat dikreditkan, dengan pajak keluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 hanya sebesar Rp. 1.500.000,00

- 7) Dalam ayat (6) disebutkan bahwa, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu :

a. penyerahan terutang pajak = Rp 35.000.000,00.

Pajak Pengeluaran = Rp 3.500.000,00

b. penyerahan tidak terutang pajak = Rp 15.000.000,00

Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp 2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp 2.500.000,00 tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 8) Dalam ayat (7) disebutkan bahwa, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, pengusaha yang diijinkan menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto hanya diwajibkan melakukan pencatatan yang meliputi peredaran bruto dan penerimaan bruto. Oleh karena besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti sehubungan dengan pengusaha tidak membuat pencatatan atas pembelian, maka Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

- 9) Dalam ayat (8) disebutkan bahwa, pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pengutannya berupa Faktur Sederhana;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Karena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

- a. Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

- b. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
- c. Cukup jelas
- d. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (15), maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan

tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan.

e. Cukup-jelas

f. Cukup jelas

g. Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan merupakan Pajak masukan yang dapat dikreditkan.

h. Sesuai dengan sistem *Self Assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :

Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui :

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar Rp 11.000.000,00 tetapi sebesar Rp 8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan :

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak masukan = Rp 8.000.000,00 (-)

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan

= Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan

= Rp 2.000.000,00

Masih kurang dibayar = Rp 15.000.000,00

10) Dalam ayat (9) disebutkan bahwa, pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang

bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2001.

- 11) Dalam ayat (10) dihapus
- 12) Dalam ayat (11) dihapus
- 13) Dalam ayat (12) dihapus
- 14) Dalam ayat (13) disebutkan bahwa, perhitungan dan tata cara pengambilan kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penjelasan ini disebutkan cukup jelas.

- 15) Dalam ayat (14) dihapus

Selanjutnya agar Wajib Pajak tertib dalam melakukan pembayaran, maka Menteri Keuangan menentukan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yang dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tersebut diatas disebutkan antara lain :

1. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. Sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan itu disampaikan.

Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

1. Dalam ayat (2a) disebutkan bahwa, apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara perhitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut :

- Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002 sejumlah Rp 10.000.000,00 sebulan.

- Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 2002 dan dilaporkan tanggal 9 Juni 2002.
 - Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
 - Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan

$$= 1 \times 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00$$
2. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Dalam ayat (4) disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Atas permohonan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Menurut pengamatan saya bahwa kolom-kolom pengisian pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, telah mengandung nilai-nilai *Self Assessment*. Karena telah diberikannya wewenang kepada Subyek Pajak untuk mengisi seluruh kolom-kolom yang ada pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka dapat disimpulkan bahwa pengisian Surat Pemberitahuan sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta pembayarannya telah menganut sistem *Self Assessment*.

4.1.1.5 HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK³⁷

1. Hak-hak Wajib Pajak

1.1 Pasal 3 ayat 4, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat

³⁷ Prof. Dr.h. Rochmat Soemitro. Op.Cit, hal.70.

Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b, untuk paling lama 6 (enam) bulan.

- 1.2 Pasal 6 ayat 1, Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.
- 1.3 Pasal 8 ayat 1, wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 1.4 Pasal 9 ayat 4, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama, 12 bulan, yang pelaksanaanya ditetapkan dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
- 1.5 Pasal 11 ayat 1, atas permohonan wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau pasal 17 B dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak

mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- 1.6 Pasal 13 ayat 4, jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga untuk satu tahun pajak, jumlah pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak tersebut, serta pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, dikreditkan dari jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak.
- 1.7 Pasal 13 ayat 4, besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak, dalam surat pemberitahuan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau tahun pajak diterbitkan Surat ketetapan Pajak.
- 1.8 Pasal 16 ayat 1, Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.9 Pasal 25 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak kurang bayar ;
- b. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ;
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ;
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil ;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.10 Pasal 25 ayat 3, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

1.11 Pasal 25 ayat 6, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan pajak.

- 1.12 Pasal 26 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 1.13 Pasal 28 ayat 2, sebelum Surat Keputusan diterbitkan, wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- 1.14 Pasal 26 ayat 5, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- 1.15 Pasal 29 ayat 2, untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib Pajak yang diperiksa.
- 1.16 Pasal 32 ayat 2, wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- 1.17 Pasal 34 ayat 1, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.18 Pasal 18 ayat 1a

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

1.19 Pasal 36 ayat 1b

Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar

1.20 Pasal 2 ayat 1 (no. 950/KMK.04/83)

Apabila setelah jangka waktu dua belas bulan sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, Kepala Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak memberitahukan hal tersebut kepada Direktur jenderal Pajak.

2. Kewajiban – Kewajiban wajib Pajak

2.1 Pasal 2 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- 2.2 Pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- 2.3 Pasal 3 ayat 2, wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2.4 Pasal 4 ayat 1, wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
- 2.5 Pasal 4 ayat 4, pengisian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak penghasilan oleh wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan kena pajak.
- 2.6 Pasal 9 ayat :
- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan tahun harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.
- (2a) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak kurang bayar tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas)

bulan, yang pelaksanaanya ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.7 Pasal 10 ayat :

- (1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara, melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha milik negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

2.8 Pasal 12 ayat :

- (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. .
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka

Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak terutang yang semestinya

2.9 Pasal 13 ayat :

(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak atau Tahun Pajak, menerbitkan surat Ketetapan Pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen).
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksudkan pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar.
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
- a. 50 % (lima puluh persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, tidak diterbitkan ketetapan pajak.

- (5) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.10 Pasal 19 ayat :

- (1) Apabila atas pajak yang terutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

- (2) Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Dalam hal kewajiban wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat pemberitahuan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

2.11 Pasal 28 ayat :

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan

menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- (3) Pembukuan atau pencatatan harus dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
- (10) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan bagi wajib pajak badan.

2.12 Pasal 29 ayat 3 (a)

Wajib pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.13 Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
- b. Menyampaikan Surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penadapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.14 Pasal 39 ayat :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ; atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; atau

- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; atau
 - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ; atau
 - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
 - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya ; atau
 - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

4.1.1.6 KEWENANGAN APARATUR PERPAJAKAN

Disamping kewenangan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Aparatur perpajakan juga mempunyai kewenangan yang lain dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

1. Melakukan Penelitian

Fiscus mempunyai, kewenangan untuk melakukan penelitian tentang kebenaran baik secara formil maupun materiil atas Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh wajib pajak.

Penelitian formil meliputi kelengkapannya, yaitu : ³⁸

1.1 Apakah identitas wajib pajak sudah diisi

1.2 Apakah SPT sudah ditandatangani

³⁸ Drs. Munawir. S,Ak, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1990 Cetakan II, hal 86.

1.3 Apakah PPH Pasal 29 sudah disetor

1.4 Apakah lampirannya sudah lengkap

Apabila ternyata terdapat hal-hal yang tersebut di atas terdapat ketidak lengkapan, maka surat pemberitahuan tersebut dapat tidak diterima atau diminta untuk melengkapi. Sedang penelitian materiil meliputi penelitian tentang kebenaran perhitungannya. Apabila terdapat kesalahan hitung atau salah tulis dalam SPT yang berakibat kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Demikian pula apabila dalam penelitian ternyata terdapat pajak yang kurang dibayar, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat ketetapan Pajak yang memuat pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya.

2. Melakukan Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam melakukan pemeriksaan fiscus berwenang untuk :

2.1 melihat, meminjam pembukuan atau pencatatan, dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

2.2 Memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban tersebut ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Adapun hasil pemeriksaan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak antara lain :

a. Surat Pemberitaan

Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada wajib Pajak, bahwa jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut.

b. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau disingkat SKPKB, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKPBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau disingkat SKPN.

Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan apabila :

1. Dari hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak dari yang seharusnya. Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak atau kurang membayar sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perpajakan. Terhadap pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % sebulan.
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan dan dikenakan kenaikan sebesar 100 %.
3. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan secara jelas sehingga fiscus tidak dapat mengetahui keadaan usaha yang sebenarnya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan dan ditambah sanksi berupa kenaikan sebesar 100 %.
4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas

barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak itu dikenakan tarif 0% atau tidak seharusnya diberikan pengembalian pajak.

5. Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 dan 29 UU no. 9 tahun 1994 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang maka aparat perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan. Dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU no. 6 tahun 1983 dikatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar ;..... sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar” sehingga kewenangan aparat untuk melaksanakan pasal tersebut di atas berada pada tingkat penyidikan agar terlaksana efektifitas pelaksanaan UU no.6 tahun 1983 dan kemudian diubah dengan UU no.9 tahun 1994 dan terakhir dirubah dengan UU No. 16 tahun 2000.

4.1.2. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor.276 / KMK / 01/ 1989 Jucnto Keputusan Presiden Republik

Indonesia nomor. 55 tahun 1989 Kantor Dinas Luar Tingkat I Kendari menjadi kantor Pelayanan Pajak type B terpisah dari KPP. Ujung Pandang. Terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 162/KMK.01/1967 ditingkatkan menjadi type A wilayah KPP kendari meliputi seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 6 (enam) Daerah Tingkat II, yaitu : Kabupaten Buton, Kota Bau-bau, Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari, Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak Kendari adalah merupakan salah satu unit organisasi pelaksana fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk mengoptimalkan pengamanan penerimaan pajak dengan VISI yaitu menjadi model pelayanan masyarakat berkelas dunia, dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta dengan misi yaitu menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan undang-undang dalam rangka menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku penuh sejak 1 Januari 1984 yang menjadi landasan hukum perpajakan menjadi semakin kuat, untuk itu dalam kaitannya dengan misi tersebut diatas. Dalam hubungannya dengan peningkatan penerimaan pajak, maka kebijaksanaan pemungutan

pajak dengan penerapan sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem Self Assessment sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan terus dilaksanakan.

Sejak diterapkannya pemungutan pajak dengan sistem Self assessment terlihat adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Kendari diperoleh data penerimaan pajak sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 1996 Sampai Tahun 2001

No	Thn Anggaran	Rencana	Realisasi	%
1	1996/1997	45.515.000.000,-	51.510.000.000,-	113,17
2	1997/1998	54.512.000.000,-	56.204.000.000,-	103,10
3	1998/1999	61.403.000.000,-	83.665.000.000,-	136,26
4	1999/2000	105.961.000.000,-	88.134.000.000,-	83,18
5	2000/2001	78.930.000.000,-	72.403.000.000,-	91,73
6	2001/2002	117.419.015.000,-	122.790.080.000,-	104,57
	Jumlah	463.790.015.000	474.706.080.000	

Sumber : KPP. Kendari

Dari data rencana dan realisasi penerimaan pajak tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, penerimaan pajak pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 (selama tiga tahun) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 1996, sebesar Rp.51.510.000.000,- dari rencana sebesar Rp. 45.515.000.000,- atau sebesar 113,17 % dan pada tahun 1997

terrealisir penerimaan pajak sebesar Rp. 56.204.000.000,- dari rencana sebesar Rp. 54.512.000.000,- atau sebesar 103,10 % kemudian pada tahun 1998, terealisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 83.665.000.000,-

Dari rencana sebesar Rp. 61.403.000.000,- atau sebesar 136,26 %.

Meningkatnya penerimaan pajak tiga tahun tersebut diatas adalah disebabkan karena wajib pajak secara keseluruhan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya karena diiringi pula membaiknya ekonomi masyarakat sebab penghasilan para wajib pajak meningkat.

Penerimaan pajak pada tahun 1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak pada tahun 1999 dikategorikan tetap meningkat, jika dibanding dengan penerimaan pajak pada tahun 1998. Penerimaan tersebut pada tahun 1999 adalah disebabkan karena penentuan rencana target. Terlalu tinggi yaitu dari Rp.61.403.000.000,- melompat menjadi Rp. 105.961.000.000,- atau lebih, sebesar Rp. 44.558.000.000,- kenaikan rencana target tersebut tidak proporsional karena tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak, yang penentuan rencana target pada tahun 1999 tidak disesuaikan dengan pertambahan jumlah subyek pajak yang ada, sehingga dalam pencapaian rencana target pada tahun 1999 tidak terealisasi / tercapai. Sehingga rencana target penerimaan pada tahun 2000 diturunkan menjadi sebesar Rp. 78.930.000.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 72.403.000.000,- penerimaan pajak pada tahun

1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan dari rencana target yang ada adalah disebabkan terjadinya resesi ekonomi yang menyebabkan berkurangnya / mundurnya penerimaan wajib pajak yang pada gilirannya menyebabkan pula tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan para wajib pajak sedang pada tahun 2001 penerimaan pajak mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar Rp. 122.790.000.000,-

Dari rencana target sebesar Rp. 117.419.015.000,- atau sebesar 104.57 %, hal tersebut disebabkan karena membaiknya lagi pendapatan wajib pajak, sehingga para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Melihat dari perkembangan realisasi penerimaan dan perkembangan jumlah wajib pajak serta surat tagihan pajak dari tahun ke tahun. Terlihat jelas bahwa adanya suatu peningkatan yang cukup berarti bagi pembangunan. Penerimaan pajak tersebut tentunya didukung oleh efektif kerja dari aparat perpajakan sebagai pemungut pajak tetap berhasil didalam melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang juga nantinya pada tahun-tahun yang akan datang telah dibuat target-target. Target tersebut dapat dipenuhi dengan adanya sistem self assessment yang mana antara wajib pajak dan aparat perpajakan saling melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU no.16 tahun 2000). Sistem self assessment ini sangatlah efektif bagi pelaksanaan perpajakan di

Indonesia umumnya dan khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak di Kendari dikarenakan dengan sistem self assessment ini penerimaan negara melalui sektor pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan ini sesuai / sejalan dengan maksud :

1. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1983, bahwa perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.
2. Dikaitkan dengan UU no. 6 tahun 1983 yang kemudian diubah dengan UU no.9 tahun 1994, dan terakhir diubah dengan UU no. 16 tahun 2000 pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa “setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan yang pada penjelasannya disebutkan bahwa, fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;
 - Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak ;
 - Harta dan kewajiban ;
 - Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Perolehan pajak, bahwa pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakat akan menyumbangkan hal-hal yang sangat berarti bagi perkembangan nasional.
4. Dengan melihat output (hasil) dari realisasi penerimaan pajak dengan sistem self assessment (UU no. 16 tahun 2000, maka dapatlah dikatakan hasilnya tampak lebih efektif karena realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem self assessment dalam pemungutan pajak sangat efektif.

Dari perkembangan jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kendari (KPP. Kendari), bahwa dari 4 (empat) KPP. Dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara, tingkat prosentase pencapaian realisasi

penerimaan dari tahun ke tahun cukup baik, untuk tahun 2000, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2
Daftar Prosentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Lingkungan
Kanwil Dirjen Pajak Wilayah XV SULSELRA

No	KPP	% Realisasi Penerimaan	Keterangan
1	Kendari	90,45 %	
2	Ujung Pandang	89,92 %	
3	Palopo	74,99 %	
4	Pare-pare	71,07 %	
5	Kanwil XII DJP	87,02 %	

Sumber : KPP Kendari

Sehubungan dengan perkembangan penerimaan pajak-pajak tersebut diatas tentu juga dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak secara proporsional dari tahun ke tahun. Dari penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kendari diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Perkembangan Jumlah Wajib Pajak
Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
I.	Wajib PPh						
	1. Orang pribadi	5.028	5.260	5.472	5.821	6.120	6.674
	2. Badan	2.473	2.698	2.958	3.267	3.842	4.777
	3. PPh 21	4.417	4.829	5.301	5.845	6.637	7.813
	4. PPh 22	1.806	1.846	2.066	2.222	2.392	2.574
	5. PPh 23	1.750	1.881	2.076	2.094	2.094	2.119
	Jumlah	15.474	16.572	17.873	19.249	21.085	23.957
II.	Wajib PPN						
	1. Orang pribadi	236	372	403	439	470	533
	2. Badan	2.000	2.094	2.353	2.636	2.991	3.673
	- Industri	106	146	166	196	212	232
	- Perdagangan	230	400	453	511	599	702
	- Jasa	1900	1.920	2.368	2.368	2.650	3.272
		2.236	2.466	2.756	3.075	3.461	4.206

Sumber : KPP. Kendari

Kemudian melihat data dari kedua tabel tersebut diatas, dimana terdapat adanya peningkatan penerimaan jumlah pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak, tentu hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari jumlah pemberian surat tagihan pajak (SPT) dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 4
Perkembangan Pemberian Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak
Dari tahun 1996 sampai dengan 2001

No	Wajib Pajak	Tahun pajak					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
I	PPh						
	1. Orang pribadi	1503	1474	866	1313	988	467
	2. Badan	89	146	175	107	148	68
II	PPN						
	1. Orang Pribadi	40	40	52	38	46	59
	2. Badan	278	300	207	218	117	126

Sumber : KPP Kendari

Dari tabel tersebut diatas terlihat adanya peningkatan jumlah surat tagihan pajak dari tahun ke tahun hal ini bukan berarti kesadaran atau kepatuhan wajib pajak menurun namun hal ini disebabkan dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun yang sangat signifikan sehingga terlihat dalam tabel seakan-akan terjadi peningkatan pemberian surat tagihan pajak.

4.1.3. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum

Efektifitas jika dilihat dari segi jumlah produk hukum perundang-undangan yang menyatakan tentang Sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku.

Perundang-undangan yang mengatur Sistem perpajakan sebagai landasan pelaksanaan pemungutan pajak

No	Produk Hukum Kolonial	No	Produk Hukum Nasional
1	Aturan bea materai tahun 1921	1.	- UU nomor 6 tahun 1983
2	Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932		Lembaran Negara Republik
3	Ordonansi pajak Perseroan 1925 (Staatsblad Tahun 1925 nomor 319)		Indonesia tahun 1983 No.49
4	Ordonansi pajak pendapatan 1944 (Staatsblad Tahun 1944 nomor 17)		Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3262
			- UU nomor 9 tahun 1994 :
			Lembaran Negara Republik
			Indonesia tahun 1994 nomor 59.
			Tambahan lembaran Negara
			Republik Indonesia nomor 3566
			(Perubahan I UU no. 6 tahun 1983)
			- UU nomor 16 tahun 2000
			Lembaran Negara Republik
			Indonesia nomor.3984
			(perubahan ke II UU no.6 tahun 1983)

Empat produk hukum perundang-undangan perpajakan warisan pemerintah kolonial Belanda tersebut berdasarkan Undang-undang nomor. 6 tahun 1983 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sedangkan berdasarkan pasal 50 UU no. 6 tahun 1983 undang-undang ini mulai berlaku 1 januari 1984. Tingkat efektif dan efisiennya dapat dilihat dari jumlah produk hukum perpajakan yang diberlakukan yakni dari 4 produk undang-undang menjadi 1 produk undang-undang yang mengatur sistem perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjadi landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini sebagian besar merupakan warisan, kolonial Belanda yang dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuatannya di tanah air kita.

Peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial walaupun telah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyesuaian namun karena berbeda falsafah yang melatar belakangi serta sistem yang melekat pada undang-undang tersebut, sehingga belum dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana untuk menunjang cita-cita bangsa dan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

Sedangkan undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai produk hukum bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka, undang-undang perpajakan tersebut diatas diundangkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1983 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut merupakan Tax Law Reform, adalah bukan merupakan perubahan biasa seperti yang telah terjadi sebelumnya, melainkan merupakan perubahan yang sangat mendasar dan mengenal falsafahnya,

mengenai sistem pemberitahuan, sistem pemungutannya. Mengenai sistem sanksinya, mengenai kepastian hukumnya, mengenai kemudahan – kemudahan dan seterusnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR) mengadakan Tax Law Reform bermaksud untuk :

1. Menyesuaikan perundang-undangan perpajakan dengan falsafah negara Pancasila dan ideologi negara, karena banyak undang-undang perpajakan (sebelum UU no.6 / 1983) yang masih berlaku, berasal dari dan dibuat oleh pemerintah kolonial yang sudah barang tentu dijiwai oleh ideologi barat, yang liberalistis, individualistis, dan kapitalis.
2. Menyesuaikan perundang-undangan perpajakan dengan struktur dan organisasi kenegaraan. Struktur organisasi Hindia Belanda berbeda dengan struktur organisasi negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, yang menuju masyarakat adil makmur dan merata.
3. Menyederhanakan sistem pemungutan pajak dengan cara sistem self assessment, cara pembayaran yang memperlakukan manusia Indonesia, lebih manusiawi, termasuk menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran pajak.

4. Memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat yang terkena kewajiban perpajakan maupun bagi pemerintah dan meningkatkan keadilan. Tidak ada lagi masalah perpajakan yang berlarut – larut tanpa ada kesudahannya seperti surat keberatan dan surat minta banding yang bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya.
5. Menghilangkan diskriminasi perpajakan, yakni memberikan perlakuan yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
6. Menyesuaikan ketentuan peraturan perpajakan dan mengikuti perkembangan perekonomian nasional.
7. Menertibkan aparatur negara yang berhubungan dengan pemungutan pajak, permasalahan pajak, tidak hanya bergantung pada penanggung pajak saja yaitu orang yang membayar pajak tetapi mempunyai berbagai segi yaitu :
 - a. Segi falsafah serta asas-asasnya
 - b. Segi perundang-undangnya
 - c. Segi kesadaran pembayaran pajak
 - d. Segi aparatur perpajakan
 - e. Segi penggunaanya

Pemungutan pajak mengandung unsur – unsur :

1. Data – data
2. Penerapan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
3. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak

4. Mutu dan kejujuran pejabat struktural, fungsional serta pelaksana
5. Efisiensi dan efektifitas
6. Pengawasan
7. Penagihan

Undang-undang perpajakan adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, materinya, maupun fungsinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan disamping itu hukum sebagai alat (fool) digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum.

Peraturan perpajakan merupakan bagian dari hukum fiskal maka dasar hukum pemungutan pajak ialah berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang". Ketentuan semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka jika rancangan UU Perpajakan, sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR), maka ini berarti sudah mendapat persetujuan dari rakyat, dengan demikian perubahan ketentuan perpajakan warisan pemerintah kolonial Belanda menjadi ketentuan perpajakan produk hukum nasional yang telah disetujui oleh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil rakyat (DPR) adalah UU no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan.

4.1.3.1 Proses Penyelesaian Sengketa dan Pengajuan Keberatan dan Banding

Sebagai produk hukum nasional, tidak terkecuali adalah Undang-undang No. 6 / 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang banyak berkaitan dengan wajib pajak memerlukan suatu hal yang disebut sebagai kepastian hukum, yang dalam hal ini termasuk didalam undang-undang tersebut ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliable merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi, selain itu, tuntutan masyarakat termasuk masyarakat usaha terhadap mekanisme yang efisien dan mampu menciptakan keadilan di bidang perpajakan, dan faktor lain sebagai upaya mengimbangi peningkatan daya kritis masyarakat yang dibarengi tuntutan berperan aktif dan partisipasi dalam pembangunan.

Pengertian sengketa pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 5 UU No 17/1997 adalah “sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat diajukan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak”, sedangkan pengertian banding sebagaimana dalam butir 6 adalah “upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan”.

Permasalahan sengketa pada umumnya terjadi atas beberapa penetapan-penetapan pejabat/ Fiscus, yang diajukan dengan keberatan,

dimana pengajuan materi dan tatacara keberatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2000.

Wajib pajak yang keberatan dapat mengajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

Syarat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah kerugian menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 12 (dua belas) bulan akan memberikan putusan atas keberatan tersebut dan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi Suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Yang perlu diketahui oleh wajib pajak bahwa dalam pengajuan keberatan tidak menunda membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pemasukan pajak.

Penetapan direktur Jenderal Pajak atas putusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak/ Badan Penyelesaian sengketa pajak sebagaimana diatur dalam UU. No.17/1977.

Meningkatnya jumlah pembayar pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, perpajakan, maka tidak dapat dihindari timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah dan sederhana.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan pajak dengan proses yang sederhana, cepat dan murah, maka dengan Undang-undang No. 17/1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut.

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah Badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa :
 - a. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang

- b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
2. Putusan BPSP mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan kepala putusan diberi kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
3. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke pengadilan umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan BPSP ditetapkan jangka waktunya.
5. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak diterima.
6. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan oleh Majelis atau oleh anggota tunggal.

7. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh BPSP dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Putusan BPSP langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain.

4.1.3.2. Proses Penegakan Hukum Perpajakan

Penegakan hukum dalam bentuk tindakan pencegahan dan penyidikan yang secara umum dilaksanakan dan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya misi perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa tindakan yang sifatnya pencegahan, tindakan administratif dan tindakan hukum dan pemeriksaan pembukuan.

Tindakan pencegahan tersebut diantaranya tercermin dalam sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dibidang perpajakan adalah berupa denda, bunga dan kenaikan, dan ini merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sebagai upaya agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dituruti / ditaati/ dipatuhi, sedangkan tindakan hukum yang dilakukan adalah melakukan

penyidikan dibidang perpajakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan.

Peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum di bidang perpajakan adalah sangat berarti sehubungan dengan peningkatan dan pengamanan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU no.16 tahun 2000 sebagai perubahan yang kedua dari UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa, setiap orang yang karena kealpaannya :
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau didenda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh

penyidikan dibidang perpajakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan.

Peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum di bidang perpajakan adalah sangat berarti sehubungan dengan peningkatan dan pengamanan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU no.16 tahun 2000 sebagai perubahan yang kedua dari UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa, setiap orang yang karena kealpaannya :
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau didenda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh

wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi adalah merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Dalam pasal 39 ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, atau
 - b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
 - c. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
 - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, atau

- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak diperlihatkan atau tidak menyajikan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang pada penjelasannya dikatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Sebagai tindak lanjut dari penegakan hukum, maka sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan hasil dari upaya penegakan hukum ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang jenis pelanggaran beserta sanksi tercantum pada batang tubuh pasal-pasal pada undang-undang No. 16/2000 sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-

pelaksanaan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada UU no.16/2000

3. Diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal : undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN dan undang-undang pajak penjualan barang mewah.

4.1.3.3. Pelanggaran Ketentuan Pidana Dibidang Perpajakan dan Penyidikan

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal dirumuskan dalam undang-undang Rochmat Sumitro berpendapat bahwa “Jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan maka dikatakan, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal, walaupun perumusannya tidak terdapat dalam perundang-undangan pajak”.³²

Perumusannya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana fiskal yang dalam hal ini pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana tercantum pada pasal 38 sampai dengan pasal 39 UU No. 6/1983 dan penyidikannya dilakukan oleh PPNS Dirjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 44 UU No.6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

³² Rochmat, Prof. Dr.SH, Asas dan Dasar Perpajakan 3 PT. Eresco, Bandung 1991, hal 3.

Dalam prinsip ilmu hukum yang selama ini dianut diakui bahwa selain ada aturan umum juga ada aturan khusus. Apabila Undang-undang tidak merumuskan hal-hal yang bersifat khusus dalam pasal-pasal-pasal, berlakulah ketentuan umum, sebaliknya apabila dirumuskan hal-hal yang bersifat khusus, maka berlakulah ketentuan umum tindak pidana di bidang perpajakan adalah tindak pidana di bidang fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana fiskal. Hal ini dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Penyidikan oleh PPNS Dirjen Pajak dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada UU No. 6 tahun 1983 terakhir dirubah dengan UU No.16/ 2000.

Daftar Pelanggaran Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Berupa Denda dan Kurungan Sebagai Berikut :

I	Denda	Pasal-pasal yang dilanggar
		Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) huruf g. Pasal 41 ayat (1) dan (2) Pasal 41A Pasal 41B
II	Kurungan	Pasal-pasal yang dilanggar
		Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) huruf g Pasal 41 ayat (1) dan (2) Pasal 41A Pasal 41B

4.1.3.4 Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, yang jenis pelanggaran beserta sanksinya tercantum pada batang tubuh pasal-pasal pada undang-undang no.16/2000.

Pengaturan pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor. 22 tahun 1996 tentang pengenaan sanksi administrasi perpajakan sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dikenakan hanya terhadap pelanggaran administratif yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Sanksi administrasi tersebut berupa :

- a. Denda administrasi
- b. Bunga
- c. Kenaikan yang terhutang

Denda administrasi, bunga dan kenaikan tersebut diatas dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian sanksi administrasi tersebut merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien. Penggunaan sanksi administrasi juga merupakan alat utama untuk memaksa seseorang dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan lebih-lebih hukum pajak yang memberikan kewajiban kepada para warga negaranya untuk ikut serta dalam pembiayaan negara yang merupakan sesuatu yang mutlak untuk kesinambungan hidup negara, sanksi memegang peranan penting untuk mematuhi aturan tersebut.

**Pelanggaran Yang Diancam Dengan Sanksi Administrasi
Berupa Denda, Bunga dan Kenaikan Adalah Sebagai Berikut :**

I	Denda	Pasal-pasal yang dilanggar
	Sebesar nilai rupiah tertentu	
	Besarnya dinyatakan dalam prosentase (%)	Pasal 7 ayat (1) Pasal 14 ayat (4)
II	Bunga	Pasal-pasal yang dilanggar
	Sebesar nilai rupiah tertentu	
	Besarnya dinyatakan dalam prosentase (%)	Pasal 8 ayat (2) Pasal 9 ayat (2a) Pasal 14 ayat (3) Pasal 15 ayat (4) Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3)
III	Kenaikan	Pasal-pasal yang dilanggar
	Sebesar nilai rupiah tertentu	
	Besarnya dinyatakan dalam prosentase (%)	Pasal 8 ayat (5) Pasal 15 ayat (2) Pasal 17 c ayat (5)

4.1.3.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pelaksanaan perundang-undangan perpajakan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam satu tahun pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa yang disahkan pada tanggal 23 Mei 1997 diharapkan dengan adanya

undang – undang tersebut mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketentuan dan kewenangan yang diatur dalam UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah :

- a. Pengaturan secara tegas beberapa pengertian, bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat meliputi pajak – pajak negara dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerinmtah daerah dapat menggunakan kewenangan Undang-Undang No.19/1997.
- b. Pengertian wajib pajak diperluas menjadi penanggung pajak tertentu dalam pengertian orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan dan pemenuhan kewajiban pajak/ pajak tertentu menurut perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewenangan pencegahan yang sering disebut sebagai cegah tangkal di bidang keimigrasian, hal ini merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak/ penanggung pajak tertentu untuk bepergian keluar dari wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewenangan penyanderaan, pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak/ penanggung pajak tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.21/KMK.01/1999 tentang perubahan Kep. Menkeu No.147/KMK.04/1988 tentang penunjukan

pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara dan Jadwal waktu pelaksanaan Penagihan Pajak, pasal 1 ayat (2) menyebutkan “....Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditunjuk sebagai pejabat untuk penagihan pajak , sedangkan pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Denda Administrasi, bunga dan Kenaikan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar, tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.

Surat teguran yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak apabila setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan ditambah 7 (tujuh) hari, belum melunasi kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 21 hari (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkannya Surat teguran, pihak yang berhutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang pajak atau denda administrasi dan/atau bunga kepada wajib pajak.

Jika tidak dilakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualnya digunakan

untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Dan selanjutnya Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan pencegahan dan penyanderaan.

4.2 PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor pelayanan pajak kendari Kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah XV Sulawesi selatan dan Tenggara serta kajian pustaka maka dilakukan pembahasan atas hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

4.2.1. Efektifitas Sistem Self Assesement

Sektor pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Dari sektor tersebut masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam membiayai pembangunan, karena sektor pajak kini merupakan sumber penerimaan negara yang amat penting bahkan menjadi andalan dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri.

Dalam rangka upaya terwujudnya kemandirian dan pembiayaan pembangunan ekonomi bangsa maka kesinambungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan harus digerakkan dengan dukungan

dana yang dititik beratkan dari penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor pajak.

Intensifikasi pemungutan pajak dapat dicapai melalui penanganan / potensi pajak secara tertib dan berkesinambungan, sedang untuk Ekstensifikasi jumlah wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan jumlah wajib pajak, khususnya pada sektor usaha yang belum terjangkau.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam golongan berbagai macam profesi mempunyai arti penting dan strategis sebagai penunjang tugas Dirjen Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Olehnya itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan ini menggunakan sistem self assessment, hal ini dimaksud untuk menggalang peran serta wajib pajak dalam mengisi kas negara.

Pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, semua wajib pajak berdasarkan Sistem *Self Assessment* harus mendaftarkan dirinya kepada Direktorat jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang

sekaligus merupakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Dan dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Kesuksesan sistem self assessment dalam pemungutan pajak bertumpu pada kesadaran yang ditumbuhkan oleh pendidikan pajak, bukan pada pemaksaan yang berasal dari penegakan hukum. Karena keberhasilan Sistem Self Assessment adalah pada kepatuhan sukarela.

Kepatuhan sukarela itu sendiri tergantung pada peningkatan kesadaran pajak dan penegakan hukum. Peningkatan kesadaran pajak antara lain dipengaruhi oleh kualitas program pendidikan pajak.

Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di jaman kolonial.

Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau, dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya “aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih”, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini.

Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembetulan undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak, sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi “ketentuan umum” bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berarti pada Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit birokratis akan dihilangkan.

Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut undang-undang ini, memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Surat Pemberitahuan diambil dan diisi sendiri oleh Wajib Pajak yang merupakan sarana untuk melaporkan sendiri pajak terhutang.
3. Dengan sistem self assessment dalam pemungutan pajak, penerimaan pajak setiap tahun cenderung meningkat.
4. Hak dan kewajiban antara wajib pajak dan Fiscus telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tingkat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan sehingga merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

4.2.3. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan – kegiatan pembangunan di segala bidang, baik materil maupun spiritual.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada pasal 50 undang-undang nomor 6 tahun 1983 disebutkan bahwa “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1984” sedangkan pada bab X Ketentuan Peralihan pasal 45 disebutkan bahwa terhadap pajak –pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk masa pajak, bagian tahun pajak,

atau tahun pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah merupakan reformasi perpajakan yang pertama dan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak, olehnya itu peran serta semua lapisan masyarakat (subyek pajak). Yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Perubahan sistem yang mendasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment wajib pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak dalam sistem perpajakan nasional.

Dari kegiatan pemungutan pajak pemerintah memperoleh dana, dimana dana tersebut adalah diharapkan untuk membiayai kelangsungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi (Musgrave and Musgrave, 1984) Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana

dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan – kegiatan pembangunan.

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Sehubungan dengan penerapan sistem self assessment dalam pemungutan pajak maka untuk mengetahui efektifitas pelaksanaannya dapat diketahui atau diukur melalui adanya suatu peningkatan penerimaan pajak, dan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun, serta menurunnya jumlah surat tagihan pajak karena adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berkaitan hal tersebut diatas maka, untuk itu dilakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kendari, juga diteliti data yang berkaitan dengan perolehan pajak, jumlah wajib pajak dan jumlah surat tagihan pajak (STP) dari tahun ketahun.

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak di Kendari menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem *Self Assesment* adalah sangat efektif.

4.2.3. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum

Ada beberapa sisi untuk meninjau dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pungutan pajak yang dalam hal ini antara lain :

4.2.3.1. Ditinjau dari segi penerapannya

Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya yakni :

- a. Siapa yang dikenakan pajak
- b. Obyek apa yang dikenakan pajak
- c. Berapa besarnya tarif pajak atas penghasilan dan penambahan nilai serta penjualan barang mewah dari wajib pajak.
- d. Bagaimana cara menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak yang terhutang.

Hal-hal tersebut diatas tidak banyak menghiraukan segi hukumnya, apakah ada kepastian hukum dan sebagainya ?

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan para wajib pajak yang berkaitan dengan perpajakan sebagian besar dalam permasalahan perpajakan hanya menemukan pada segi penerapannya tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya.

4.2.3.2. Ditinjau dari segi hukumnya

Tinjauan perpajakan dari segi hukum, lebih menitik beratkan pada perikatan yakni pada hal-hal :

- a. Hak dan kewajiban wajib pajak
- b. Subyek pajak dalam hubungannya dengan subyek hukum
- c. Hak penguasa untuk mengenakan pajak
- d. Tidak dipungut, pembebasan, keringanan dan pengembalian pajak
- e. Penagihan pajak dengan surat paksa
- f. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana
- g. Pembukuan
- h. Penyidikan
- i. Hak mengajukan keberatan
- j. Hak pengajuan banding atas keberatan yang ditolak
- k. Daluwarsa

Peraturan –peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut diatas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum akan memberi kepastian hukum.

Dalam peninjauan hukum kita tidak cukup mengetahui penerapannya saja, tetapi harus juga menilai peraturan yang menjadi dasarnya.³³

4.2.3.3. Ditinjau dari proses penyelesaian sengketa serta pengajuan keberatan dan banding

Hukum mempunyai tujuan keadilan demikian juga ketentuan perundang-undangan perpajakan yang merupakan bagian dari hukum fiskal. Keadilan dalam ketentuan perpajakan sudah dimulai sejak disusunnya undang-undang pajak. Jika penerapannya dirasa terjadi ketidakadilan menurut wajib pajak, maka tersedia saluran hukum untuk mencari keadilan, baik melalui lembaga surat keberatan maupun melalui surat banding ke Badan Peradilan Pajak.

Badan peradilan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dirubah lagi dengan UU Nomor 16 tahun 2000 yang dibentuk khusus untuk menentukan dan memutus permohonan banding di bidang fiskal (perpajakan).

³³ Sumitor Rochmat, Prof. Dr. SH, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung 1992, hal 5.

Badan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan banding tersebut kini telah dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 1997 dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang disyahkan pada tanggal 23 mei 1997. Badan ini merupakan saluran hukum untuk memperoleh keadilan dibidang perpajakan.

- a. Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat adalah ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasinya dari asas keadilan.
- b. Pemberian waktu kepada Wajib Pajak selama 30 hari dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengajuan keberatan kepada Dirjen Pajak.
- c. Demikian juga penetapan waktu 60 hari kepada Ditjen Pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak merupakan jangka waktu yang wajar juga untuk pengumpulan data, informasi dalam memutuskan keberatan diterima atau ditolak.
- d. Penolakan oleh Dirjen Pajak dapat pula penolakan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang berarti Dirjen Pajak menetapkan lain dari penetapan pejabat dibidang perpajakan sebelumnya yakni penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil.

- e. Dalam mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa pajak tertuang dalam pasal 37 ayat (2) bahwa pada intinya atas banding yang disampaikan pada BPSP dan belum dilakukan pemeriksaan maupun sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.
- f. BPSP menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau anggota tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti yang lain. Dalam bukti yang diajukan berupa surat atau tulisan tidak terikat pada bentuknya. Surat atau tulisan dapat berupa fotokopi, rekaman, film, disket, kaset, faksimile, teleks, keluaran cetak (print out) atau tanda terima.
- g. Ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Putusan BPSP merupakan putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pengajuan banding atau gugatan yang diajukan kepada BPSP merupakan upaya hukum terakhir.

4.2.4.4. Ditinjau Dari Proses Penegakan Hukuman

Penegakan hukum dalam rangka pembahasan ini, diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (*law Enforcement*), tetapi juga meliputi langkah preventif dalam arti

pembuatan undang-undang. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang Hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Penegakan hukum dalam bentuk preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut Law Compliance, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴¹

Pengklasifikasian kriteria kebijaksanaan menurut tujuan-tujuan kebijaksanaan berdasarkan A. Hoogerwerf yang dikutip oleh Bambang Sunggono menyebutkan bahwa "Kebijaksanaan yang preventif bersifat mencegah atau yang represif bersifat menekan pada kebijaksanaan prefentif. maka tujuan utamanya adalah mencegah sesuatu, sedangkan tujuan utama kebijaksanaan represif adalah menekan atau membasmi sesuatu yang terjadi.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)⁴². Sedangkan

⁴¹ Hamzah Andi, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Triaskti, 1998, hal 2.

⁴² Darto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal 111

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu.⁴³

Hukum perpajakan yang mengatur ketertiban yang berkaitan dengan praktek perpajakan dengan tujuan agar kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dapat dilindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal atau damai dalam arti setiap warga masyarakat berperilaku patuh dan taat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dapat terjadi pula, hukum dilaksanakan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga dalam hal yang demikian itu hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan yaitu harus mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mengutip ekonom almarhum Erns Schumacer, orang yang cerdas memecahkan masalah, orang yang jenius menghindari masalah,

⁴³ Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hal 24.

mencegah penyakit lebih mudah dan lebih murah ketimbang mengobatinya. Mencegah kesehatan lebih mudah dan lebih murah ketimbang menghadapinya. prinsip – prinsip inipun digunakan dalam pencegahan dan penyidikan penyelundupan. Untuk beberapa metode dipergunakan untuk membuat keputusan.

4.2.4.5. Ditinjau dari Proses Pelanggaran Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Santoso Brotodihardjo menyebutkan bahwa hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan cara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini; juga peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapinya.

Sartan G, menyebutkan bahwa hukum pidana fiskal dalam hukum pajak positif dapat mudah sekali dikenali dari beberapa kata tertentu, yaitu “paling tinggi” untuk sanksi denda / bunga, “paling lama” untuk sanksi hukuman penjara dan “dengan sengaja” (unsur penting hukum pidana).

Namun perlu dimaklumi bahwa undang-undang itu senantiasa tidak sempurna. Ketidak sempurnaan tersebut diakibatkan karena seringnya terjadi perubahan kondisi yang diakibatkan globalisasi dan temuan-temuan teknologi, oleh karena itu tidak mungkin undang-undang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas atau terinci. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap atau tidak

jelas. Sekalipun undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas, harus tetap dijalankan. Oleh karena itu perlu adanya penafsiran yang memberikan kejelasan atas undang-undang atas teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dan filosofi undang-undang dapat diterapkan terhadap peristiwa yang konkrit.

Penafsiraan yang baik dan tepat atas teks perundang-undangan, akan menjadikan undang-undang tersebut diterapkan secara tepat memenuhi perasaan keadilan pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat termasuk masyarakat usaha.

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pelanggaran ketentuan perpajakan merupakan pelanggaran ketentuan tindak pidana fiskal yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan melalui orang;
- b. yang memenuhi perumusan undang-undang,
- c. yang oleh undang-undang diancam dengan pidana,
- d. yang melawan / bertentangan dengan hukum,
- e. yang merugikan masyarakat / orang,
- f. yang dilakukan dibidang perpajakan

Secara umum hukum pidana yang dapat membawa dampak yang kurang enak atau menyakitkan. Oleh sebab itu penggunaan hukum pidana harus benar-benar selektif, hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa "sifat pidana sebagai

ultimum remedium (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Dikaitkan dengan teori-teori dan tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*)
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Maka penetapan sanksi pidana fiskal cenderung sesuai dengan teori gabungan yang merupakan teori kombinasi / gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Pellegrino Rossi yang merupakan penulis pertama teori ini menyatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Adanya seperangkat tujuan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Untuk itu seperangkat tujuan yang sifatnya integratif adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan / pengimbangan.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomer 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai bagian dari hukum fiskal maka tindak pidana dibidang perpajakan merupakan tindak pidana fiskal. Pelanggaran ketentuan pidana dibidang perpajakan adalah pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 sampai dengan pasal 39 UU No 16 / 2000.

4.2.4.6 Ditinjau dari Proses Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi

Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa Sanksi administrasi, jika dibandingkan dengan sanksi pidana, lebih lunak. Akan tetapi, walaupun sanksinya lebih lunak. Bahkan sebaliknya, mungkin mempunyai pengaruh lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak segera mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi lebih tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang

sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak. Maka dimasa lampau tidak banyak masalah penyelundupan pajak yang merupakan kejahatan dihadapkan kepada pengadilan. Sanksi administrasi sudah cukup untuk mendapatkan efek yang diharapkan.⁴⁴

Pengertian Administrasi, menurut Prayudi Atmosudirdjo, mempunyai tiga arti:⁴⁵

- a. Administrasi negara sebagai “aparatur” negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah guna menyelenggarakan Undang-Undang, kebijaksanaan dan kehendak pemerintah.
- b. Administrasi negara sebagai fungsi “aktivitas” atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional. Administrasi sebagai fungsi hukum adalah penyelenggaraan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang secara konkrit, causal dan individual.
- c. Adminitrasi sebagai suatu “proses” tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain administrasi sebagai suatu proses teknis.

Dalam hubungannya ini Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa yang menjatuhkan sanksi administrasi pajak adalah aparatur negara atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan

⁴⁴ Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991, hal. 94.

⁴⁵ Prof. Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Aparatur negara terdiri dari fungsionaris/pejabat. Sanksi administrasi, jika tidak dapat diterima oleh Wajib Pajak, dapat ditentang dengan mengajukan keberatan kepada pejabat atasan dari pejabat yang menjatuhkan sanksi administrasi itu. Oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diminta pembebasan atau pengurangan denda yang telah dijatuhkan.

Jika denda administrasi yang dijatuhkan tidak dibayar, maka denda itu dapat ditagih dengan surat paksa, yang berarti bahwa jika Wajib Pajak, setelah diperingatkan dan ditegur, masih juga belum melakukan pembayaran, maka dikeluarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan jalan ini akhirnya barang-barang Wajib Pajak dapat disita dan dijual lelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang.

4.2.4.7 Ditinjau dari Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Adanya Undang-Undang yang memuat ketentuan hukum pajak formal yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa". Peraturan ini mengatur tentang penagihan dengan surat paksa, sita, sandera, daluwarsa dan segala sesuatu yang bertalian dengan itu. Lebih lanjut lagi ketentuan hukum formal tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang

dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Analisis yang dilakukan penulis terhadap latar belakang perlunya penagihan dengan surat paksa yakni, bahwa masih adanya atau dijumpainya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang sehingga oleh Wajib Pajak perlu dilakukan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Untuk itu hal-hal yang diperhatikan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Dengan telah dikeluarkannya UU No. 19 / 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini maka UU No 19 / 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa menjadi tidak berlaku.
2. Terhadap tunggakan Pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, perlu dilakukan/dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Sehingga dapat diatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memotivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.
3. Undang-undang No. 19 / 1997 ini di Dalam rangka menegakkan keadilan tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakekatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan.

4. UU No. 19 / 1997 mengatur bahwa gugatan Penanggung pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, Sita atau lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan kepada Pengadilan Negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka efektifitas pelaksanaan sistem self assessment di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan UU no. 9 tahun 1994 dan telah diperbaharui lagi dengan UU no. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar pelaksanaan dari sistem self assessment dapat dikumpulkan dalam suatu pengertian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem Self Assessment di Kantor Pelayanan Pajak Kendari dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang untuk negara sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dengan adanya sistem self assessment ini dapat mendorong para wajib pajak maupun calon wajib pajak untuk berperan serta dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem self assessment sangatlah efektif bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak maupun aparatur perpajakan sebagai pemungut pajak.

Administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu UU nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Efektivitas Sistem Self Assessment dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Kendari adalah berlaku efektif karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dilihat dari hasil kualitas efektifnya dapat diukur keberhasilannya melalui :
 - a. Meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun. (tabel 1 hal 121).
 - b. Menurunnya pemberian surat tagihan pajak (STP) kepada wajib pajak dari tahun ke tahun.(tabel 2 hal. 126)
 - c. Menurunnya pemberian Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak dari tahun ke tahun. (tabel 3 hal. 126)

5.2. SARAN- SARAN

Setelah mengetahui dalam hal pelaksanaan sistem self assessment di kantor Pelayanan Pajak di Kantor, kaitannya dengan undang-undang no.6 tahun 1983 yang kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor. 9 tahun dan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya UU no. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Dasar Pelaksanaan Sistem Self Assessment, penulis memberikan saran sesuai dengan pengetahuan penulis yaitu :

1. Dengan diberinya kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, maka aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan dengan penuh kewajiban dan rasa tanggung jawab dan bersih agar supaya wajib pajak benar-benar melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000. Yang mana hal ini juga turut menciptakan manusia-manusia Indonesia yang sadar dan taat pajak serta semakin menanamkan pengertian “Orang bijak taat pajak” dan menumbuhkan budaya malu tidak membayar pajak dan bangga tidak berhutang.
2. Untuk pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi sistem Self Assessment tersebut telah dikeluarkan berbagai ketentuan pelaksanaan yang mana perlu diinformasikan kepada seluruh wajib pajak, dan perlu dilakukan inventarisasi permasalahan untuk selanjutnya dilakukan

penyempurnaannya dan untuk peningkatan pelayanan publik oleh seluruh aparat pemerintah (bukan hanya aparat Dirjen Pajak) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan pelaksanaan sistem *Self Assessment*.

RINGKASAN

Undang-undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 1994, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang tersebut diatas adalah merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan Pembangunan Nasional.

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat subyek pajak tersebut yaitu diterapkannya sistem *Self Assessment* yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Ciri dan corak pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment* adalah :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan Pembangunan Nasional.

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan Pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dari hal-hal tersebut diatas menggambarkan adanya suatu komitmen dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara sebagai dana untuk kelanjutan pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan Nasional.

Dari permasalahan ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dan dalam pengumpulan data dengan jalan wawancara bebas terpimpin, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan dibahas secara kualitatif.

Dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka telah diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan dengan baik, hal ini karena hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan Fiscus telah dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Penerimaan Pajak Negara dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, hal ini didasarkan dari adanya kejujuran dan kepatuhan dari Wajib Pajak untuk memnuhi kewajiban perpajakannya.
3. Jumlah Wajib Pajak (Subyek Pajak) dari tahun ke tahun cenderung adanya peningkatan, hal ini didasarkan dari ekstensifikasi yang terus dilakukan oleh aparat Dirjen Pajak.
4. Pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang Perpajakan atas suatu pelanggaran terus dilakukan misalnya :
 - a. Pengenaan sanksi administrasi
 - b. Pengenaan sanksi pidana
 - c. Penagihan pajak dengan Surat Paksa
 - d. Di sediakannya lembaga keberatan dan banding apabila terjadi sengketa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1985.
- Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Aminata, *Dasar-dasar perpajakan*, Pustaka Prima, Surakarta, 1990.
- Anwar, Yozar, *Stratgei Perpajakan Mendukung Pembangunan*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Asikin Agustini DKK, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990.
- C, S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1987.
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitaif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Gunadi, *Berita Pajak 1357*, Jakarta, 1997.
- Hasan, M. Ali, Zakat, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hasan Sadili, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta 1983.
- Ichsan, H.M *Administrasi Perpajakan*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Universitas Terbuka, Jakarta. 1986.
- JM. Aritonang, *Diktak Hukum Pajak Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.

- Keraf, Gorys, *Eksposisi, Komposisi Lanjutan II*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mangunsbroto, Guritno, *Ekonomi Publik Edisi 3*, BPFE Yogyakarta, 1973.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987.
- Miles, Malthew B. *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar madya Dalam Ilmu ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 1997.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Makalah pada diklat Bidang pendapatan Type C, DIKLAT Dati I Jateng, Semarang, 1997.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Muqodium, *Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Munawir, (DKK), *Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta, 1990.
- , *Perpajakan*, Leberty, Yogyakarta, 1990.
- Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Nasution, Norman S. *Metode Penelitian Naturalistik – Kuantitatif*, Tarsito, Bandung, 1986.
- Nasution S, Thomas M, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Nawawir, H. Hadari dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Oemangkatab, *Peraturan-peraturan Tentang Perpajakan*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1984.
- Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, 1993.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1980, 1982.

- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1983.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni Bandung, 1977.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Singarimbun, Masri, Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soemitro Rochmat, *Pajak dan Pembangunan PT. Eresco*, Bandung, 1988.
- , *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1991.
- , *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco, Bandung, 1990.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, CV. Agung, Semarang, 1990.
- , *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989.
- , *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1990.
- , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Pendekatan Sosial Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara Jakarta.
- , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1980.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali : Jakarta, 1983.
- , *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya : Bandung, 1985.
- , *Pengantar Penelitian hukum*, UI – Press, Jakarta, 1986.

-----, *Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan hukum*, Alumni Bandung, 1979.

Wahiono Padmo, *Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Wahyutomo, Imam, *Pajak UUP AMP YKPN*, Yogyakarta, 1994.

Makalah Ilmiah

Bawazier, Fuad, 1994, *Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan Serta Kesiapan Fiskus dan Masyarakat dalam Menyambut Perubahan Undang-Undang Perpajakan, dalam Seminar Reformasi Perpajakan*, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum, Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, Bagian Humas F.H. UNDIP, Semarang.

Mardiyasmo, 1995, *Strategi Implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 dalam Rangka Menjaring Wajib Pajak*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Perpajakan, Universitas Islam Riau bekerjasama dengan Kantor Wilayah II DJB Sumatera Bagian Utara, Pekanbaru.

-----, 1994. *Tinjauan Krisis Terhadap Sistem Perpajakan Nasional dan Faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Restitusi Pajak*, Fakultas Hukum UNS, Solo.

-----, 1995, *Seluk Beluk Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dsan Implikasinya Terhadap Dunia Usaha di Indonesia*, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Muhammad, Marie, 1992, *Etika Profesi Akuntan dan Kepatuhan Perpajakan*, makalah disampaikan pada Konversi Nasional Akuntansi ke 2, Yogyakarta.

Mulyodiwarno, 2001, *Kajian Ringkasan Terhadap Perubahan Kedua UUKUP*, Jurnal Perpajakan, Vol 1, No. 3, Oktober 2001, Jakarta.

Miyasto, 1995, *Segi-segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian beban Pajak, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

- , 1997, *Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Perpajakan, Fak. Ekonomi Undip, Semarang.
- Wirassih, Esmi P, 1983, *Pembinaan Kesadaran Hukum*, Masalah-masalah Hukum, Fak. Hukum Undip, Semarang.
- , 1984, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Masalah-masalah hukum, Fak. Hukum Undip, Semarang.
- , 1991, *Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsi-fungsinya*, Masalah-masalah Hukum Fak. Hukum Undip, Semarang.
- , 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Humas Fak. Hukum Undip, Semarang.
- , 1999, *Pardigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Deskripsi Tentang Hukum Di Indonesia Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi*, Arena Hukum, Fak. Hukum Unibraw, Malang.
- Santoso, Amir, 1989, *Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik-3, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), AIPI dan PT. Gramedia, Jakarta.

Jurnal/ Majalah

- Arena Hukum*, Majalah Fak. Hukum Unibraw, No.9 Tahun 3 November 1999
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No. 1426/ Tahun XXXII/1 September 2000
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1428/ Tahun XXXII/1 Oktober 2000
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1429/ Tahun XXXII/15 Oktober 2000
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1431/Tahun XXXII/15 November 2000
- Berita Pajak*, Majlaah, Dirjen Pajak No.1432/ Tahun XXXII/1 Desember 2000
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1433/Tahun XXXII/15 Desember 2000
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1434/Tahun XXXII/1 Januari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1435/ Tahun XXXII/15 Januari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1436/ Tahun XXXII/1 Pebruari 2001

- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1437/Tahun XXXII/15 Pebruari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1438/Tahun XXXII/1 Maret 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1434/Tahun XXXII/1 Januari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1435/Tahun XXXII/15 Januari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1436/Tahun XXXII/1 Pebruari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1437/Tahun XXXII/15 Pebruari 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1438/Tahun XXXII/1 Maret 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1440/Tahun XXXII/1 April 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1441/Tahun XXXII/15 April 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1442/Tahun XXXII/1 Mei 2001
- Berita Pajak*, Majalah, Dirjen Pajak No.1443/Tahun XXXII/15 Mei 2001
- Magister Hukum*, Jurnal, UII, vol. 2 No. 4 Oktober 2000

Hasil Penelitian

- Budiyono, Tri, 1998, *Tesisi : Fungsi Regulasi Pajak Penghasilan Sebagai Instrumen Untuk Mendorong Penanaman Modal*, MIH Undip, Semarang.
- Irawan, Candra, 2001, *Tesis, Kebijaksanaan Pemerintah dan Ketidak Berdayaan Usaha Kecil (Kajian Kritis Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Bengkulu)*, MIH Undip, Semarang.
- Rahardjo, Noor, 1999, *Tesis : Pemberdayaan Hukum Pajak dalam Ekonomi Global*, MIH Undip, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.23/1996 tentang Rencana Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 18/PJ.7/1996 Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Ketetapan MPR Nomor II MPR/1983 tentang GBHN.